Dr. Asnawan, M.S.I.

PERDAMAIAN BERBASIS KOMUNITAS

Studi tentang Model Penyelesaian Konflik Bernuansa Keagamaan

Bildung

UNIVERSITAS

AL-FALAH AS-SUNNIYAH

جامعة الفلاح السنية

KENCONG – JEMBER – INDONESIA

https://uas.ac.id/

PERDAMAIAN BERBASIS KOMUNITAS
Studi tentang Model Penyelesain Konflik Bernuansa Keagamaan

GERAKAN PEMUDA ANSOR
NAHDLATUL ULAMA

Dr. Asnawan, M.S.I.

PERDAMAIAN BERBASIS KOMUNITAS

Studi tentang Model Penyelesaian Konflik Bernuansa Keagamaan

Copyright ©2021, Dr. Asnawan, M.S.I.
All rights reserved

PERDAMAIAN BERBASIS KOMUNITAS
Studi tentang Model Penyelesaian Konflik Bernuansa Keagamaan

Dr. Asnawan, M.S.I.

Editor: Nanang Budianto
Desain Sampul: Ruhtata
Layout/tata letak Isi: Tim Redaksi Bildung

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Perdamaian Berbasis Komunitas: Studi tentang Model Penyelesaian Konflik Bernuansa Keagamaan /Dr. Asnawan, M.S.I./Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2021

x + 84 halaman; 15 x 23 cm
ISBN: 978-623-6379-36-3

Cetakan Pertama: 2021

Penerbit:
BILDUNG
Jl. Raya Pleret KM 2
Banguntapan Bantul Yogyakarta 55791
Telpn: +6281227475754 (HP/WA)
Email: bildungpustakautama@gmail.com
Website: www.penerbitbildung.com

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari Penerbit dan Penulis

KATA PENGANTAR

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim

Alhamdulillah, dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT., kendati dengan format yang sangat sederhana, tulisan yang sederhana ini tentang *Perdamaian Berbasis Komunitas: Studi Tentang Model Penyelesain Konflik Bernuansa Keagamaan"* ini dapat terselesaikan. Mudah-mudahan karya yang sederhana ini membawa banyak manfaat bagi pencerahan kehidupan kita semua. *Amin.*

Mengamati secara seksama fenomena keberagaman masyarakat, mendengarkan mereka berbicara tentang keyakinan dan memahami ekspresi keberagaman mereka dengan menggunakan perspektif mereka, maka kita akan mengetahui beragam konsep kebenaran berbasis rasionalisasi yang berbeda-beda. Seperti yang kita ketahui bersama Indonesia kental dengan ciri masyarakat plural dan heterogen yang terdiri dari berbagai, suku, agama, etnis, budaya, paham, ideologi dan kelompok dan atau golongan.

Konflik yang berujung pada kekerasan sudah mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana permukiman, peribadatan, lembaga pendidikan, perahu nelayan, korban luka, bahkan hingga hilangnya nyawa manusia, kejadian tersebut merupakan musibah sosial yang meskipun tidak pernah dikehendaki, disadari atau tidak hal tersebut tidak

terhindari. Untuk itu upaya membukukan catatan sederhana ini semata-mata tidak dimaksudkan untuk membangkitkan kembali konflik yang telah "redam". Sama sekali tidak. Akan tetapi dengan dibukukannya hasil diskusi dan kajian mendalam ini, diharapkan menjadi tanda larang agar kita tidak lagi terjebak dalam konflik yang sangat melelahkan bahkan menimbulkan banyak kerugian dan hanya menjadi ancaman disintegrasi bangsa sebagai rasa persatuan Indonesia bahkan merugikan khususnya untuk kemajuan Islam, Bangsa dan Negara.

Selain itu, kami menyadari, bahwa penyelesaian karya ini karena juga didukung oleh banyak pihak. Terlalu banyak pihak selain tim peneliti yang terlibat untuk disebutkan satu-persatu, dan kepada semuanya, kami menyampaikan terima kasih, semoga partisipasinya akan dinilai sebagai amal sholeh, dan *jazakumullah khairan katsira*. Namun demikian, nama-nama berikut, karena dukungannya, perlu kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga, khususnya kepada:

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta yang telah memberikan motivasi dalam penelitian yang sangat sederhana ini.

Para *stake holder* dan tokoh masyarakat yang berada di Puger Jember khususnya para informan dan komunits pemuda dan perempuan yang telah banyak melakukan shering dan partisipasinya dalam memberikan informasi tentang data penelitian yang kami perlukan dan para anggota komunitas yang ikut serta dalam kegiatan penelitian ini.

Rektor IAI Al-Falah As-Sunniyyah Kencong Jember, Kepala LP2M beserta seluruh staf dan para dosen yang

telah membantu mulai dari persiapan penulisan buku yang sederhana ini berupa fasilitas dalam diskusi. Hal ini merupakan dukungan moril yang luar biasa, khususnya menyangkut kontribusi pemikirannya, referensinya hasil penelitian ini.

Sekali lagi, kepada semuanya disampaikan terima kasih, semoga amal baiknya diterima oleh Allah dan mendapatkan balasan yang setimpal disisi-Nya. Akhirnya, kepada Allah SWT jualah semuanya kami serahkan kembali. Semoga karya ini bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 25 Maret 2021

Penulis

Dr. Asnawan, M.S.I.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **v**
DAFTAR ISI **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Fokus Pengabdian 10
C. Tujuan Pengabdian 11
D. Penelitian Terdahulu 11

BAB II KAJIAN TEORITIK **14**
A. Peacebulding, *Conflict Relapse* dan Pengelolaan Konflik 14
B. Konflik Antara Kelompok dan Kekerasan Sosial 16

BAB III METODE PENGABDIAN **27**
A. Tempat dan Waktu Pengabdian 27
B. Metode Pengabdian 27
C. Teknik Pengabdian/Pengumpulan Data 30
D. Teknik Analisa Data Pengabdian 32
E. Instrumen Penelitian 34

BAB IV TEMUAN PENGABDIAN **36**
A. Konflik Bernuansa Agama di Puger Kabupaten Jember 36

B. Gelang Merah dan Wahidiyah: Dinamika Lokal 37
C. Fenomena Sosial dari Santet Sampai Rivalitas Tokoh 38
D. Resolusi Konflik: Pemecah Masalah Keagamaan 44
E. Partisipasi Kelompok Komunitas *Peace Building* 50
F. Modul *Peace Building* Berbasisi Komunitas di Puger 51

BAB VI PENUTUP 73

DAFTAR PUSTAKA 75
BIODATA PENULIS 80

PONDOK PESANTREN

Misykatul Ulum

SEKAR PUTIH – MANGARAN

SITUBONDO – JAWA TIMUR

https://ppmisykatululum.blogspot.com

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Studi tentang konflik sosial senantiasa menarik untuk dibahas dan dikaji bahkan diteliti, terutama pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan. Karena masyarakat yang mengalami perubahan, akan mengalami dinamika dan gesekan-gesekan yang dapat melahirkan konflik, baik yang bersifat horizontal (antar masyarakat) maupun vertikal (masyarakat dengan pemerintah). Tidak terkecuali di Indonesia, seperti yang kita ketahui bersama Indonesia kental dengan ciri masyarakat plural dan heterogen yang terdiri dari berbagai, suku, agama, etnis, budaya, paham, ideologi dan kelompok dan atau golongan.[1] Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menyadari arti pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai konsep yang mendasari suatu negara hukum. Undang-undang Dasar 1945 telah membuat nilai-nilai HAM pada pembukaan dan pasal-pasalnya yaitu pasal 27 sampai

[1] Hasrullah, *Dendam Konflik Poso* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 1. dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik social juga dijelaskan tentang sumber sumber konflik yaitu pada Pasal 5 yang berbunyi a). permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya; b). perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis; c). sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi; d). sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau e). distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

dengan pasal 31. Di dalam pasal 27 ayat (1), menerangkan bahwa *"segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali".* Berdasarkan pasal 27, butir (1) Undang-undang Dasar 1945 tersebut, di Indonesia tidak boleh ada diskriminasi hukum terhadap warga negaranya.[2]

Selanjutnya dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak-Hak Azazi Manusia (HAM) masalah kebebasan dan kerukunan umat beragama di atur pada Pasal 22 dan 70. Dalam Pasal 22 dikatakan bahwa setiap orang mempunyai hak kebebasan untuk memeluk suatu agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu; Negara menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memeluk dan mengamalkan agamanya serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kemudian pada Pasal 70 UU itu dikatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kewajibannya itu, setiap orang wajib mengacu kepada pembatasan semata-mata untuk menjamin penghargaan kepada hak dan kebebasan orang lain dan penegakkan keadilan, serta memperhatikan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban masyarakat dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Dengan deretan-deretan peraturan dan perundang-undangan yang telah dipaparkan di atas, mengindikasikan bahwa Indonesia seakan sudah tidak kenal yang namanya konflik bahkan kekerasan. Akan tetapi, konflik sosial di Indonesia bergulir sejak tahun 1990 menunjukkan eskalasi yang cukup tinggi. Latar belakang konflik sosial tersebut antara lain; *pertama*, konflik antarkelompok masyarakat; *kedua*,

[2] Robert Alexander, *Konflik Antar Entis dan Penanggulangannya* (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005), 1

konflik antar suku atau antar dan intra agama; *ketiga*, konflik antara masyarakat dengan pemerintah dengan latar belakang kasus-kasus tertentu. Konflik sosial bermotif agama acapkali terjadi di sekitar kita yang notabennya umat beragama, baik itu internal agama ataupun antar agama.[3] Meskipun konflik sosial yang terjadi tidak secara mutlak disebut sebagai konflik agama, dengan alasan konflik itu tidak dilakukan atas dasar bernuansa agama. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa unsur-unsur agama tidak dilibatkan dalam konflik-konflik tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa tahun terakhir ini, di Indonesia menjadi salah satu kawasan di dunia yang paling produktif dalam memproduksi aneka kisah tragis di sekitar kekerasan. Selama 14 tahun setelah reformasi, setidaknya ada 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Yayasan Denny JA mencatat, dari jumlah itu paling banyak kekerasan terjadi karena berlatar agama/paham agama sebanyak 65 persen. Sisanya, secara berturut-turut adalah kekerasan etnis (20 persen), kekerasan jender (15 persen), dan kekerasan orientasi seksual (5 persen).[4] Fenomena-fenomena semacam itu, sangatlah bertentangan dengan tradisi khas bangsa Indonesia, gotong royong, musyawarah rukun dan tolong menolong.[5] Merujuk pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik sebagaimana yang sudah diratifikasi (menjadi hukum nasional Indonesia) melalui UU no 12 tahun 2005, idealnya negara memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan hak sipil dan politik warga negaranya, lebih utamanya hak dan kebebasan yang

[3] Sandi Suwardi Hasan, *Konflik Sosial dan Urgensi Dialog Agama, al-'Adalah,* 2 (Jember: STAIN Press, 2007), 240 lihat juga Ayu Sutarto, *Menjadi NU menjadi Indonesia* (Jember, Kopyawisda Jatim, 2005), 77

[4] Sabrina Asril, *Catatan Kekerasan Indonesia pasca Reformasi,* dalam http://1ahmadiyah.blogspot.com/2013/01/catatan-kekerasan-indonesia-pasca.html

[5] Slamet Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila* (Yogyakarta: ANDI, 2006), 63

mendasar seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa dan hak atas keadilan. Namun dalam kenyataannya, alih-alih terlindungi yang terjadi justru kekerasan dan melanggar kebebasan sipil dan politik warga negara.[6]

Dalam kurun waktu hampir 19 tahun, insiden kekerasan terkait konflik keagamaan di Indonesia telah melibatkan korban jiwa lebih dari 55.000 orang. Di antaranya, 761 orang merupakan korban tewas, 1873 orang merupakan korban luka-luka dan sebanyak 52.446 orang merupakan korban hilang dan mengungsi. Adapun dari segi harta benda, kekerasan terkait isu-isu keagamaan di Indonesia telah mengakibatkan rusaknya 1.330 rumah, 70 rumah ibadah dan 593 bangunan lainnya, sehingga totalnya mencapai 1.993 bangunan. Jumlah kerugian harta-benda tersebut belum termasuk jenis kendaraan bermotor, baik roda dua maupun empat, serta berbagai kerugian yang tidak dilaporkan secara jelas jumlahnya oleh media yang menjadi sumber studi ini.[7]

Adapun catatan kasus pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia selama tahun 2011 yang paling tinggi adalah pelarangan atau pembatasan aktifitas keagamaan atau kegiatan ibadah kelompok tertentu dengan 49 kasus, atau 48%, kemudian tindakan intimidasi dan ancaman kekerasan oleh aparat negara 20 kasus atau 20%, pembiaran kekerasan 11 kasus (11%), kekerasan dan pemaksaan keyakinan 9 kasus (9%), penyegelan dan pelarangan rumah ibadah 9 kasus (9%), dan kriminalisasi atau viktimisasi keyakinan 4 kasus

[6] Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), "Keadilan Macet, Kekerasan Jalan Terus : Laporan Tahunan Kondisi HAM di Indonesia 2012" (tt,tp, 2013), 14

[7] Ihsan dkk, *Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)*, (hasil penelitian yang bekerjasama Yayasan Wakaf Paramadina (YWP) Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM), *The Asia Foundation* (TAF), Jakarta, 2009), 31-32

(4%). Berdasarkan data ini dapat dipahami bahwa selama tahun 2011, telah terjadi peningkatan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di berbagai daerah di Indonesia. Apabila tahun sebelumnya hanya 64 kasus maka jumlah ini meningkat 18% menjadi 92 kasus.[8]

Konflik bernuansa agama dalam panggung sejarah sejak pertama kali ditunjukkan oleh Habil dan Qabil. Konflik tersebut seyogyanya bukan konflik agama, akan tetapi oleh para sejarawan dikaitkan dengan agama, bahwa konflik yang berujung pada pembunuhan itu ditunjukkan oleh Islam. Padahal konflik Habil dan Qabil adalah konflik sosial yang berskala kecil, yakni karena penolakan Qabil terhadap titah ayahnya, karena Qabil ingin mengawini saudara perempuannya sendiri.[9] Kisah Habil dan Qabil merupakan sumber filsafat kita, sebagaimana Adam sebagai sumber filsafat sejarah kita tentang manusia. Pertarungan antara Habil dan Qabil adalah pertarungan dua kubu yang saling berlawanan yang berlangsung sepanjang sejarah, dalam dialektika sejarah[10]Bukankah kisah para nabi juga tak lepas dari wacana kekerasan? Nabi Yusuf, misalnya, dikisahkan menghadapi dan menjadi korban rencana kekerasan saudara-saudara kandungnya sendiri. Nabi Isa yang diintai oleh ancaman pembunuhan, yang dalam tradisi Yudeo-Kristiani, bahkan kemudia diyakini menjadi korban kekerasan. Nabi Muhammad sempat memasuki *'aamul huzn* –masa sedih, lantaran kehilangan orang yang dapat member rasa aman, sementara Ia masih harus menghadapi resistensi paman-

[8] http://alislamiyah.uii.ac.id/2013/08/22/menguak-akar-kekerasan-bernuansa-agama/#_ftn4 lihat juga The Wahid Institute, Lampu Merah Kebebasan Beragama, Laporan Kebebasan Beragama dan Toleransi di Indonesia, (Jakarta: The Wahid Institute, 2011), 1

[9] Ibnu Katsir, *Kisah Habil dan Qabil (Dar Al-Manarah) dalam ebook* www.Islambasics.com

[10] Imam B. Jauhari, *Teori Sosial: Proses Islamisasi dalam Sistem Ilmu Pengetahuan,* Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012), 49

pamannya sendiri, boikot, terror dan bahkan pengejaran oleh suku Quraisy yang hendak membunuhnya.[11] Konflik dalam tubuh umat Islam di Indonesia, barangkali hanya sekedar aib yang harus ditutupi manakala terjadi sesaat atau tidak banyak korbannya. Tetapi manakala peristiwa itu sudah mengorbankan sendi-sendi kebersamaan dan ukhuwah, perlu kiranya dijadikan pelajaran. Dari kasus yang dipicu oleh persaingan *(competition)* usaha, perebutan warisan, hingga pengrusakan rumah ibadah dan pembantaian pemuka agama, sudah sering terjadi. Tuduhan terhadap kelompok atau aliran sesat dalam agama, biasanya yang kemudian menimbulkan kerawanan internal.[12]

Ada satu hal menarik yang perlu digaris bawahi. Bahwa di Indonesia, agama Islam menjadi agama mayoritas. Menurut Abul A'la Al Maududi sebagai mana dikutib oleh Afif Muhammad, tekanan mayoritas atas minoritas hampir seluruhnya terjadi di Negara-negara yang mayoritas warganya bukan muslim. Sementara di Negara-negara yang mayoritas warganya muslim, penindasan hampir tidak pernah terjadi. Bahkan beberapa sarjana muslim mengatakan bahwa, berbeda dengan agama Islam, agama-agama non-Islam khususnya Katolik dan Kristen tidak memiliki ajaran tentang toleransi.[13]

Pada tahun 2003, Muktamar Pemikiran Islam Nahdlatul Ulama (MPI-NU) yang diselenggarakan di Situbondo, menghasilkan hal yang sejalan dengan pernyataan Afif yaitu, mencoba untuk melihat doktrin-doktrin keIslaman bukan

[11] Abdul Munir Mulkan, dkk, *Membongkar Praktik Kekerasan: menggagas Kultur Nir-Kekerasan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), 43

[12] Tim Balai Litbang, *Mencari Solusi Konflik dan Kekerasan Internal Umat Islam* dalam http://www.balitbangdiklat.kemenag.go.id/sinopsis-hasil-penelitian/kehidupan-beragama/283-mencari-solusi-konflik-dan-kekerasan-internal-umat-beragama.html

[13] Afif Muhammad, *Agama & Konflik Sosial* (Bandung: MARJA, 2013), 19

hanya sebagai hukum, melainkan sebagai etika sosial yang bisa diterima oleh seluruh umat manusia, apa pun agama, suku dan rasnya. Sejatinya, keislaman tidak hanya dibatasi oleh dan untuk umat *(rahmatan li al-'alamin)*. Islam sebagai etika sosial merupakan jalan untuk mengukuhkan semangat kebangsaan.[14]

Pernyataan Abul A'la Al Maududi tersebut tidak salah akan tetapi tidak sepenuhnya benar. Faktanya, agama Islam di Indonesia merupakan agama mayoritas, kita mengetahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam (88%), selebihnya adalah Kristen Protestan (6%), Katolik (3%), Hindu (2%), Budha, Konghucu dan lainnya (1%)[15], akan tetapi Islam hampir tidak pernah absen dalam menyumbang catatan konflik yang berwujud kekerasan/penindasan. Misalkan di Manado, Maluku Utara pada tahun 2000, atau yang dikenal dengan kerusuhan 171 karena terjadi pada tanggal 17 bulan 1 (Januari), pada waktu itu umat Islam sebanyak 76,47%, umat Hindhu 17,55%, Kristen 2,5% dan Budha 2%.[16]

Bahkan lebih parahnya lagi, umat Islam saling merusak terhadap sesesama muslimnya. Konflik kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah di Cikeusik pada pada 6 Februari

[14] Rizqon Khamami, *Tashwirul Afkar* (Jakarta Selatan: LAKPESDAM dan TAF, 2004), 41 edisi nomor 17. Selain itu, Harun Nasution, dalam *Islam Ditinjau dari Berbagai Perspektif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2002), 97 menyinggung hal syari'at pun, pemikiran yang ditawarkan Al-Tahtawi, syari'at itu sendiri harus disesuaikan dengan perkembangan modern.

[15] M. Atho Mudzhar, *"Lingkungan Dan Peran Strategis Fkub Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Persatuan Nasional"* dalam ,http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/indeks/artikel-ilmiah/593--lingkungan-dan-peran-strategis-fkub.html

[16] Tim Balai Litbang, *Konflik-konflik Sosial Bernuansa SARA di Berbagai Komunitas.* Dalam http://www.balitbangdiklat.kemenag.go.id/sinopsis-hasil-penelitian/kehidupan-beragama/172-konflik-konflik-sosial-bernuansa-sara-di-berbagai-komunitas-studi-kasus-kerusuhan-mataram-januari-2000.html

2011 dan juga konflik Ahmadiyah di Transito Mataram[17], bahkan beberapa bulan terakhir kekerasan antar Islam juga terjadi di Sampang-Madura pada tahun 2012 yakni kekerasan terhadap pengikut syi'ah.[18] Dan disusul oleh konflik yang tidak jauh beda, yakni konflik yang melibatkan isu Syi'ah dan Sunni di Kecamatan Puger Kabupaten Jember yang berujung pada kematian. Namun perkembangan yang cukup menggembirakan muncul kemudian dengan adanya upaya-upaya yang lebih serius baik dari inisiatif pemerintah maupun masyarakat untuk memperkuat *peace building* dengan upaya membangunan kembali kehidupan masyarakat di daerah berkonflik.[19] Dengan demikian, tidak terlalu salah pendapat yang mengatakan bahwa ketegangan yang muncul belakangan ini menunjukkan betapa tidak sejatinya harmoni antar sesama Islam yang saling berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan hal ini menunjukkan betapa rapuhnya relasi dalam lingkup keagamaan khusunya dalam agama Islam yang selama ini kita banggakan. Pada tulisan ini, penulis ingin membongkar praktik kekerasan yang terjadi di wilayah. Konflik sosial di Kecamatan Puger ini sejatinya bukan hanya terjadi satu kali, melainkan sudah berlangsung beberapa kali, misalkan pada bulan Juni 2012 dengan motif pengajian yang berujung cederanya beberapa warga, dilanjutkan pada tahun berikutnya, yakni 2013 pada bulan September yang dikemas dengan karnaval dan berujung pada korban nyawa seseorang[20]. Menurut KH Hasyim Muzadi, mantan ketua PBNU, konflik

[17] Sabrina Asril, *Catatan Kekerasan Indonesia Pasca Reformasi*, dalam http://1ahmadiyah.blogspot.com/2013/01/catatan-kekerasan-indonesia-pasca.html

[18] http://www.tribunnews.com/nasional/2013/08/26/pengusutan-kasus-sampang-hasilkan-14-butir-kesimpulan

[19] Syafuan Rozi, *Kekerasan Komunal:Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 6

[20] Radar Jember, *Karnaval Rusuh, Satu Tewas,* tanggal 12 September 2013,1

tersebut bisa jadi seperti bom waktu yang dapat meledak lagi kapan saja, untuk itu beliau meminta agar konflik di Puger tersebut diselesaikan sampai ke akar-akarnya.[21]

Puger Wetan dan Puger Kulon yang di dalamnya mempunyai masyarakat yang plural terutama masyarakatnya yang mempunyai pemahaman keagamaan yang berbeda juga secara geografis amat strategis karena terletak di daerah pantai selatan Kabupaten Jember masyarakatnya mata penghasilannya adalah nelayan terbesar di Kabupaten Jember. Secra umum Puger memiliki 24 pondok pesantren akan tatapi sera realitas masyarakat puger fanatisme terhadap kiai/ tokoh sangat kuat sehingga dengan kefanatikannya tersebut perintah/intruksi dari tokoh tersebut yang membuat konflik yang bernuasa kegamaan. Puger hampir tiap tahun terjadi konflik yang bernuansa agama ini banyak dipicu oleh dua kelompok masyarakat seperti yang terjadi yakni antara *sunni-syi'ah*. Karena letaknya yang strategis dan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang lemah, dan dengan penghasilan masyarakat yang kurang menentu sehingga terindikasi ketika masyaratnya mengalami musim peceklik maka masyarakat cepat terreaksi untuk larut dalam konflik yang bernuansa agama tersebut. Dengan jumlah penduduk 13. 698 dengan 98 % beragama Islam dan sisanya beragama katolik di Desa Puger Kulon ini akan tetapi dalam meningkatkan SDM dan *Out put* masyarakatnya harus selalu diberikan pemahaman keagamaan melaui komunitas/cpmmunity baik dari kelompok pemuda dan perempuan guna menjaga agar saling menghormati, saling menjada dan menjadi pelopor perdamaian.

[21] Radar Jember, *Satu Menyerah di Lumajang*, tanggal 17 September 2013

Para tokoh masyarakat yang terlibat dalam dalam penaggulangan untuk mencari solusi yang tepat dan berkelanjutan tidak hanya bertumpu pada tingkat muspika dan pejabat bahkan ormas seperti NU yang berada di lingkungan Puger baik dari Kabupaten Jember sendiri akan tetapi belum menyentuh kepada masyarakat akar rumput (*gress root*) untuk itu perlu pembinaan lebih lanjut. Pemulihan dari arus bawah (*gress root*) baik itu melaui komunitas masyarakat seperti komunitas pemuda atau komunitas perempuan dari dua kubu antara *Sunni-Syi'ah* yang berkonflik perlu untuk dicetak kader perdamain sehingga masyarakat bawah lebih peka terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi dan nantinya akan menjadi duta perdamaian. Untuk itu dalam kajian ini yang berbasisnya pada perdamaian berbasis komunitas sebagai upaya untuk melakukan dampingan yang berkelanjutan dalam mencetak kader perdmain di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

B. Fokus Pengabdian

Dalam penelitian pengabdian ini akan focus masalah antara lain:

1. Bagaimana perdamaian berbasis komunitas dalam penyelasaian konflik bernuansa agama di Puger Kulon dan Puger Wetan Kabupaten Jember?
2. Bagaimana perdamaian berbasis komunitas dalam penyelasaian konflik bernuansa agama melalui komunitas pemuda dan perempuan di Puger Kulon dan Puger Wetan Kabupaten Jember?
3. Bagaimana perdamaian berbasis komunitas dalam penyelasaian konflik bernuansa agama melalui *stake holder* di Puger Kulon dan Puger Wetan Kabupaten Jember?

C. Tujuan Pengabdian

Dalam penelitian pengabdian mempunyai tujuan antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui tentang perdamaian berbasis komunitas dalam penyelasaian konflik bernuansa agama di Puger Kulon dan Puger Wetan Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui tentang perdamaian berbasis komunitas dalam penyelasaian konflik bernuansa agama melalui komunitas pemuda dan perempuan di Puger Kulon dan Puger Wetan Kabupaten Jember.
3. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui tentang perdamaian berbasis komunitas dalam penyelasaian konflik bernuansa agama melalui perdamaian di Puger Kulon dan Puger Wetan Kabupaten Jember

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan peyelesaian konflik antara lain: penelitian yang ditulis oleh Andik Wahyun Muqoyyidin yaitu Potret Konflik Bernuansa agama di Indonesia: signifikansi model resolusi berbasis teologis transformatif. Dijelaskan bahwa berbagai kasus pelarangan pembangunan rumah ibadah. Kasuskekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah adalah contoh untuk pola kedua, sedang bentrokan Sunni-Syi'i merepresentasikan polakonflik ketiga. Dilihat dari sudut mana pun, kondisi semacamitu tentu sangat merugikan umat manusia secara umum, dan masyarakat serta negara Indonesia secara khusus. Tulisan

inimengkaji secara intens seputar persoalan tersebut dan berusaha menguak hakikat akar persoalan yang melatar belakanginya. Dari analisis itu, kita mendiskusikan signifikansi model resolusi yanglebih paradigmatik dan holistik berbasis teologi transformatif. Teologi transformatif meniscayakan umat Islam untuk menghindari pemahaman agama secara parsial dan sepotong-sepotong. Demikian pula, teologi ini menuntut umatnya untuk melepaskan diri dari beban-beban sejarah keagamaan yangsering mendistorsi agama dari nilai dan perannya yang hakiki. Melalui pengembangan teologi ini, keberagamaan manusia akandilihat sebagai proses kreatif dan penuh tanggung jawab untuk mengembangkan kehidupan yang selalu disandarkan kepadanilai-nilai moralitas perennial; dari keadilan, kesetaraan, hinggakedamaian dan kesejahteraan.

Peran pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) dalam mencegah tumbuhnya radikalisme berbasis agama (Studi terhadap Buku Pelajaran PAI di Tingkat SMU yang Mendorong Faham Radikal) yang di tulis oleh KH. Utawijaya Kusumah dijelaskan bahwa Pasca tumbangnya rezim Orde Baru, aksi terorisme dan radikalisme Islam merebak di Indonesia. Para pelakunya semuanya adalah umat Islam dan mengaku sebagai lulusan lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu, berbagai pendekatan penanganan terorisme dan radikalisme Islam lainnya harus pula senantiasa diupayakan. Salah satunya adalah melalui pendekatan pendidikan. Pendekatan pendidikan ini antara lain dilakukan dengan cara merekonstruksi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diajarkan di institusi-institusi pendidikan. Rekonstruksi PAI ini penting dan urgen dilakukan. PAI terbukti tidak cukup mampu melahirkan peserta didik yang toleran, moderat, dan inklusif. Buktinya antara lain dapat dilihat dari banyaknya

pelaku terorisme dan radikalisme Islam yang melibatkan kaum muda terpelajar, baik pelajar, mahasiswa, maupun lulusan perguruan tinggi. Lebih dari itu, belakangan ini ada kecenderungan upaya-upaya sistematis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok keagamaan tertentu untuk mengajarkan doktrin keagamaan garis keras di kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA).

Lembaga-lembaga pendidikan diduga tidak kebal terhadap pengaruh ideologi radikal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Beberapa guru mengakui adanya konsep Islam radikal yang mungkin menyebar di kalangan siswa karena kurangnya pengetahuan keagamaan; (2) Unit-unit kajian Islam di sekolahsekolah berkembang baik namun tidak ada jaminan adanya kekebalan dari radikalisme karena proses belajarnya diserahkan kepada pihak ketiga; (3) Di dalam buku rujukan dan kertas kerja terdapat beberapa pernyataan yang dapat mendorong siswa untuk membenci agama atau bangsa lain. Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa strategi deradikalisasi yang dapat diimplementasikan yaitu deradikalisasi preventif, deradikalisasi preservatif terhadap Islam moderat, dan deradikalisasi kuratif. Salah satu strategi memerankan PAI dalam mencegah berkembangnya faham radikalisme di kalangan pelajar adalah merekonstruksi PAI yang di dalamnya meliputi berbagai aspek seperti kurikulum, pendidik, materi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran.

BAB II
KAJIAN TEORITIK

A. *Peacebulding, Conflict Relapse* dan Pengelolaan Konflik

Konflik yang telah terjadi di beberapa negara merupakan cerminan dari adanya gesekan akibat perbedaan pendapat antara aktor-aktor yang terlibat sengketa. Aktor-aktor ini dapat berupa negara dengan negara atau negara dengan beberapa kelompok yang menginginkan pemikirannya untuk didengar dan diprioritaskan. Meskipun terdapat beberapa konflik yang dapat diakhir, namun seringkali penyelesaian konflik tersebut masih menghasilkan *negative peace*, yang mana *negative peace* ini merupakan suatu keadaan dimana perdamaian belum benar-benar tercapai karena masih terdapat beberapa potensi konflik yang dapat timbul dan dapat memunculkan konflik baru yang akan memiliki dampak yang cenderung lebih besar dan berkepanjangan dibandingkan dengan konflik yang sebelumnya. Oleh karena itu, perlu adanya serangkaian resolusi konflik untuk merubah *negative peace* menjadi *positive peace*. Ada beberapa pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan untuk mencapai adanya *positive peace* pada sebuah konflik. Pendekatan-pendekatan tersebut di antaranya adalah *peace keeping, peace making, peace building,* dan *peace settlement*.

Pada dasarnya dalam resolusi konflik, tiga pendekatan utama yakni pendekatan *peace keeping, peace making* serta *peace building* merupakan pendekatan-pendekatan yang seringkali disebut sebagai segitiga perdamaian, hal ini dikarenakan ketiga pendekatan utama ini merupakan pendekatan yang benar-benar berfokus pada usaha-usaha untuk menyelesaikan konflik yang tengah terjadi di wilayah bersengketa.[1]

Tidak terlalu mudah menegaskan lingkup dan kerangka waktu proses *peacebuilding.* Sebagian besar konsep *peacebuilding* merujuk pada pengertian sempit, misalnya "perdamaian negatif" *(negative peace),* dan oleh sebab itu memusatkan perhatiannya pada berbagai upaya untuk meredam konflik bersenjata itu. Definisi UN (1992), misalnya, memahami *peacebuilding* sebagai proses untuk menghentikan konflik kekerasan berskala besar dan mencegah kemungkinan kembali merebaknya konflik kekerasan itu. Sekretaris Jenderal PBB, Boutros Boutros Ghali, merumuskan *peacebuilding* sebagai "upaya komprehensif untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur yang akan cenderung menopang konsolidasi perdamaian maupun membangun *a sense of confidence* dan kesejahteraan masyarakat". Laporan Brahimi (2000) merujuk pada tujuan yang lebih luas, yaitu untuk "membangun kembali landasan perdamaian dan menyediakan berbagai perangkat untuk membangun sesuatu yang lebih dari sekedar ketiadaan perang". Namun kata "landasan" dan "perangkat" menjadikan tujuan-tujuan itu berada dalam batas penyiapan, bukan perwujudannya.

[1] Miall, Hugh, Ramsbotham, Oliver and Woodhouse, Tom. 1998. *Contemporary Conflict Resolution*. UK: Cambridge Politic Press.

B. Konflik Antar Kelompok dan Kekerasan Sosial

Cakupan bahasan konflik antar kelompok, Walter G. Stephan dan Cookie White Stephan yang dikutip oleh Hasrullah, manawarkan tiga teori tentang konflik antar kelompok, yaitu[2]: *(1) Realistic Group Conflict Theory*. Teori ini mempunyai premis yang didasari oleh kompetisi untuk memperebutkan resources *(land, money, natural resources)* atau pun *value, belief* dan *norms*. Teori realistic ini digunakan untuk memprediksi konsekuensi psikologis, di mana realitas konflik kelompok memicu meningkatnya kohesivitas dan etnosentrisme antarkelompok. Perubahan ini biasanya diiringi dengan kekerasan terhadap kelompok lain. *(2) Relative Deprivation Theory*, teori ini cenderung menfokuskan diri pada persepsi, yakni persepsi menjadi kelompok yang kurang beruntung. Seperti yang dikemukakan Thomas, persepsi merasa tertindas dapat amemicu munculnya konflik, meskipun pada persepsi yang dirasakan belum tentu kebenarannya. Konsep teori ini cenderung mempunyai kaitan dengan teori pertukaran sosial (*social exchange theory*) karena dalam cakupan bahasannya, konflik muncul dari perasaan dalam suatu kelompok yang merasa kurang beruntung ditinjau dari segi *input* dan *output*-nya jika disbandingkan kelompok lain. (3) *Basic Psychological Need Theory*. Teori ini menekankan adanya pertikaian dalam pemenuhan kebutuhan dasar psikis. Isu yang dimunculkan dalam teori ini adalah konflik muncul karena terjadi pembohongan kebutuhan psikis seperti; rasa aman, identitas, pengakuan, dan pastisipasi. Konflik yang dilandasi oleh kebutuhan psikis cenderung bertahan cukup lama hingga kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.

[2] Hasrullah, *Konflik Poso*, 43

Dalam kamus pupuler bahasa Indonesia, konflik percekcokan, perselisihan, pertentangan. Sedangkan menurut Webster, istilah konflik merupakan konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Akan tetapi kata tersebut kemudian berkembang dengan masuknya "ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide dan lain-lain".[3] Sedangkan dalam *Oxford Dictionary* sebagaimana dikutip oleh Alpha Amirachman konflik adalah *a situation in which people, groups or countries are involved in a serious disagreement or argument* (situasi dimana orang-orang, kelompok atau Negara terlibat dalam perselisihan serius).[4]

Berkenaan dengan konflik, secara teoritik menurut Ralf Dahren Dorf yang dikutip oleh Rozi, merupakan fenomena yang selalu hadir *(inherent omni-presence)* dalam setiap masyarakat manusia. Menurutnya, perbedaan pandangan dan kepentingan diantara kelompok-kelompok masyarakat tersebut merupakan hal yang cenderung alamiah dan tidak terhindarkan. Namun pihak yang menolak sudut pandang ini mengatakan bahwa akan menjadi persoalan besar tatkala cara untuk mengekpresikan perbedaan kepentingan diwujudkan dalam ekspresi yang tidak demokratis dan merusak melalui penggunaan cara kekerasan fisik.[5] Definisi klasik mengenai konflik adalah seperti dikemukan Louis Coser, yaitu: *"a struggle over values and claims to secure status, power, and resources, a struggle in which the main aims of opponents are to neutralize, injure, or eliminate rivals"*.

Namun, untuk kepentingan studi ini, definisi ini dianggap masih terlalu umum dan tampaknya lebih didasari

[3] Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004) 9

[4] Alpha Amirrachman. *Revitalisasi Kearifan Lokal,* (Jakarta Selatan: ICIP, 2007) 2

[5] Syafuan Rozi dkk, *Kekerasan Komunal,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 5

atasrasionalitas tindakan dengan motif ekonomi-politik. Ini kurang cocok untuk studi ini karena, seperti yang telah ditunjukkan oleh beberapa studi, aksi keagamaan – termasuk dalam konteks konflik dan kekerasan – sulit untuk dipahami semata-mata dari segi rasionalitas ekonomi dan politik atau kekuasaan. Berbagai tindakan protes atau kekerasan terkait konflik keagamaan banyak berasal dari sumber-sumber kultural dan ideologis agama itu sendiri, dan rasionalitas yang mendasari konflik tersebut lebih bersifat ekspresif atau simbolik; misalnya, sebagai ekspresi dari apa yang dipahami suatu komunitas agama sebagai "ketaatan" terhadap ajaran agama atau sebagai simbol solidaritas terhadap komunitas.[6]

Menurut Mitchell yang dikutib oleh Suharno, konflik dapat diartikan sebagai hubungan antar dua pihak atau lebih (individu maupun kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki-sasaran-sasaran yang tidak sejalan.[7] Jocye Hocker dan William Wilmut, di dalam buku Interpersonal Conflict, menjelaskan beberapa pandangan tentang konflik, pandangan-pandangan tersebut antara lain:[8]

1. Konflik adalah hal yang abnormal karena hal yang normal ialah keselarasan. Mereka yang menganut pandangan ini pada dasarnya termasuk menyampaikan bahwa suatu konflik hanyalah merupakan gangguan stabilitas. Karena konflik dilihat sebagai suatu gangguan, maka harus diselesaikan segera, apapun penyebabnya (walaupun mungkin saja terjadi bahwa penyebabnya yang terdalam tidak ditemukan).

---

[6] Ihsan dkk, *Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)*, 7.

[7] Kutipan ini diambil dari makalah Suharno yang disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Resolusi Konflik pada Civics Community, Konflik, Etnisitas dan Integrasi Sosial (Universitas Negeri Yogyakarta, 2006), 2

[8] Robby I. Candra, *Konflik dalam hidup sehari-hari,* (Yogyakarta: Kanisius,1992), 15

2. Konflik sebenarnya hanyalah suatu perbedaan atau salah paham. Kata-kata serupa itu sering kali disampaikan oleh orang-orang yang terlibat dalam sebuah konflik. Dengan kata lain, konflik tidak dinilai sebagai hal yang terlalu serius. Bahkan menurut penganut pendapat ini, penyebab konflik ialah kegagalan berkomunikasi dengan baik, sehingga pihak lain tidak dapat memahami maksud kita yang sesungguhnya.
3. Konflik adalah gangguan yang hanya terjadi karena kelakuan orang-orang yang tidak beres. Pendapat ini sering pula diungkapkan dengan cara lain. Orang-orang yang senang terlibat konflik adalah anti-sosial paranoid, ngawur atau senang berkelahi. Menurut penganut pendapat ini, penyebab suatu konflik adalah ketidakberesan kejiwaan orang tertentu.

Menurut Haryanto sebagaimana dikutip oleh Nurman Said, perbedaan kepentingan, faham, ide merupakan keniscayaan dalam kehidupan, maka sudah dapat dipastikan konflik menjadi sesuatu yang selalu hadir sepanjang perjalanan kehidupan masyarakat tersebut. Namun dalam melihat konflik yang terjadi di masyarakat perlu dibedakan antara konflik yang menggunakan kekerasan *(violence),* dengan konflik yang tidak menggunakan kekerasan *(non-violence)*.[9]

Secara umum, Pruitt dan Gahagan membagi konflik dalam tiga model, yaitu antara lain:

1. Model *Aggressor-Defender*

   Model ini menarik garis pembeda di antara kedua belah pihak yang berkonflik, salah satu pihak, aggressor

[9] Nurman Said, *Masyarakat Muslim Makasar* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 26

(penyerang) dianggap memiliki suatu tujuan atau sejumlah tujuan yang mengakibatkannya terlibat di dalam konflik bersama pihak lain defender (pihak bertahan).[10] Istilah agresor dam defender di dalam model ini tidak dimaksudkan sebagai tidakan evaluatif. Dengan perkataan lain, istilah-istilah ini tidak menyiratkan bahwa satu pihak dalam posisi salah dan pihak lainnya benar di dalam kontroversi yang terjadi. Agresor adalah pihak yang melihat adanya kesempatan untuk mengubah hal-hal yang searah dengan kepentingannya, sedangkan defender adalah pihak yang berusaha menolak perubahan tersebut.[11]

2. Spiral-Konflik

Model ini menjelaskan bahwa eskalasi merupakan hasil dari suatu lingkaran setan antara aksi dan reaksi. Taktik-taktik *contentious* yang dilakukan oleh suatu pihak mendorong timbulnya respons *contentious* dari pihak lain, sehingga lebih lanjut juga memberikan respon *contentious* dari pihak yang bersangkutan (pihak lawan). Ada dua kelompok besar spiral-konflik, spiral yang bersifat balas-membalas *(retaliatory),* masing-masing pihak menjatuhkan hukuman kepada pihak yang lain atas tindakan-tindakannya yang dianggap tidak menyenangkan *(aversif).* Misalkan, adu argumentasi yang diikuti dengan saling membentak kemudian diikuti dengan adu jotos bahkan bisa jadi lebih dari itu. Ada juga spiral yang defensif, masing-masing pihak memberikan reaksi dalam rangka melindungi diri dari ancaman yang dirasakannya ada di dalam tindakan defensif pihak lain. Mereka yang menderita *(suffering)* karena kekerasan yang dilakukan pihak lain, bisa membuat penderitaan balasan, sehingga

[10] Dean G. Pruit dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, 200
[11] Dean G. Pruit dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial* , 201

terjadilah kekerasan secara timbale balik. Oleh karena itu, kekerasan bukan saja bisa menimbulkan penderitaan dalam jangka pendek, melainkan bisa juga menimbulkan menimbulkan penderitaan akibat kekerasan secara proses social dan konjungtif atau bahkan permanen –seperti yang dialami oleh orang-orang korban perang Israel-Palestina, Nazi-Yahudi, korban Perang Salib atau penderitaan akibat kolonialisme dan berbagai perang saudara di banyak negeri. Tentu saja, termasuk perang saudara atau keonflik etnisitas dan keagamaan di negeri kita sendiri yang terjadi padaa 1948, 1965, dan juga akhir-akhir ini.[12] Dalam kaitannya dengan Konflik Agama, Yusuf Qardhawi mengatakan, untuk mempertemukan kedua kelompok ini, sepatutnya memperingatkan kedua pihak berkonflik -yang tersesat jauh dari agamanya- agar segera kembali ke jalan tengah yang moderat, untuk mendorong kaum ekstrem lainnya juga kembali ke jalan tengah sehingga bertemu bersama-sama di pertengahan jalan.[13]

3. Perubahan Struktural

Model ini menjelaskan bahwa konflik, beserta taktik-taktik yang digunakan untuk mengatasinya, menghasilkan residu. Residu ini berupa perubahan-perubahan yang terjadi baik pada pihak-pihak yang berkonflik maupun masyarakat dimana mereka tinggal. Residu kemudian mendorong perilaku *contentious* lanjutan, yang levelnya setara atau lebih tinggi, dan mengurangi usaha untuk mencari resolusi konflik. Ada tiga macam bentuk perubahan structural, yaitu: *pertama*, berubahan psikologis; *kedua*, perubahan dalam

[12] Mulkan *Membongkar Praktik Kekerasan*, 44

[13] Yusuf Qardhawi, *Islam Ekstrem* (Bandung: Mizan, 1993), 128 lihat juga dalam Lib-ForAll Foundation, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), 46-47.

kelompok dan kolektif lainnya; dan yang *ketiga*, perubahan dalam masyarakat di sekeliling pihak yang berkonflik. [14]

Dean G. Pruitt mendefinisikan eskalasi sebagai *"the use of increasingly harsh tactics"* (penggunaan taktik yang semakin keras). Eskalasi juga berarti semakin luasnya sasaran atau wilayah konflik, atau semakin banyaknya orang-orang yang terlibat, atau semakin canggihnya alat-alat konflik yang digunakan.[15] Jika dilihat dari sejarah umat manusia, konflik dan kekerasan sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Ia ada sejak menusia itu sendiri muncul di permukaan bumi. Latief sebagaimana dikutip oleh Zubir menyebutkan bahwa kekerasan justru dianggap bagia dari budaya masyarakat.. bahkan kajian-kajian historis, semuanya tidakpernah menyangkal bahwa kekerasan telah ada sejak adanya manusia sehingga kekerasan dapat dikatakan juga sebagai bagian dari masyarakat. Jika diamati dengan seksama, terdapat perbedaan antara konflik dengan kekerasan. Kekerasan diakibatkan oleh konflik, namun belum tentu konflik selalu mengakibatkan kekerasan. Namun dalam perkembangannya, konflik merupakan penyebab terjadinya kekerasan[16] bahkan antar keduanya semakin sulit untuk dipisahkan.

Perlu dikemukakan bahwa sejak awal, "kekerasan" yang kita bicarakan sekarang merupakan terjemahan dari kata *violence* dalam bahasa Inggris. Ada hal yang menarik disini, bahwa kata kekerasan dalam arti ini masih nelum terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W J. S Poerwadarminta. Dalam kamu ini kekerasan diartikan

[14] Dean G. Pruit dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, 206
[15] Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. *Teori Konflik Sosial*, 139
[16] Zaiyardam Zubir. *Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan: Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Kearifan Lokal*. (Yogyakarta: INSIST Press, 2010) , 20-21

sebagai 1) "sifat (hal dsb) keras; kegiatan; kekuatan dsb" dan 2) "paksa (an); kejang; kekejangan; sedangkan kata sifatnya "keras" diartikan sebagai 1) padat kuat dan tidak mudah berubah bentuknya atau tak mudah pecah; lawan lunak, empuk, lembut; dan 2) pada umumnya menyatakan sifat hal yang sangat atau lebih daripada keadaan biasa, misalnya kuat; teguh, giat, dsb. Pengertian "keras" dan "kekerasan" seperti ini –yang belum menyamakan kekerasan dengan violence- juga terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia susunan Sutan Mohammad Zain.[17]

Kekerasan dalam konteks ini merupakan kekerasan terjemahan dari *violence.* Kekerasan merupakan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain[18]. Hal ini hamper sama dengan pengertian *violence* yang diberikan *Webster's New World College Dictionary,* yaitu *"physical force used so as injure, damage, or destroy; extreme roughness of action"* pengertian ini merupakan tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak, atau menghancur orang atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut.[19]

Robert Audi, seperti dikutip I Marshanda Windu merumuskan *violence* sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang; atau serangan, penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang potensial dapat menjadi milik

[17] Mulkan, *Membongkar Praktik Kekerasan*, 20
[18] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka, 1988) 425
[19] Mulkan, *Membongkar Praktik Kekerasan*, 20

seseorang[20] maupun bagi kelompok yang berkonflik.[21] Dalam bahasa sehari-hari konsep kekerasan meliputi pengertian yang sangat luas mulai dari tindakan penghancuran harta benda, pemerkosaan, pemukulan, perusakan yang bersifat ritual, penyiksaan dan bahkan sampai pada pembunuhan.

Menurut asal katanya, kekerasan *(violence)* berasal dari gabungan kata latin *(violentus)* yakni *vis* dan *latus vis* berarti daya dan kekuatan sedangkan *latus* berarti membawa. Jadi hal ini merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik maupun verbal yang mencerminkan tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas artinya bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukan dalam rumusan kekerasan ini.

Secara sosiologis, kekerasan merupakan konflik sosial yang tidak terkendali oleh masyarakat dengan mengabaikan norma dan nilai sosial sehingga menimbulkan tindakan merusak.[22] Sedangkan menurut Fisher yang dikutip oleh Suharno, kekerasan merupakan sesuatu yang meliputi tindakan, perkataan, sikap atau berbagai struktur dan sistem yang mengakibatkan kerusakan secara fisik, mental, sosial dan lingkungan dan atau menghalangi seseorang meraih potensinya secara penuh.[23]

---

[20] I Marshanda Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan Galtung* (Yogyakarta: Kanisius,1992), 62.

[21] Zubir. *Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan,* 21

[22] Fitri Yanti, *Kekerasan dalam Berpacaran*, *Skripsi* (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2012), 9

[23] Suharno, *Konflik, Etnisitas dan Integrasi Sosial*, 2

Robert Gurr merumuskan corak kekerasan atas beberapa tingkatan yaitu:

1. *Turmoil* yaitu tindakan kekerasan politis yang tidak terorganisasi dan partisipasi popular, termasuk serangan politis, kerusuhan, konflik politik dan pemberontakan kedaerahan yang relative spontan. *Turmoil* adalah gerakan yang bersifat spontan. Jika ada kejadian seperti pencurian, maka masyarakat langsung menghakimi, seperti mengeroyok, hingga membakar sampai mati. Hal ini biasanya bentuk sikap muak masyarakat terhadap pencuri yang merajalela selama ini sehingga ketika tertangkap basah, akumulasi sakit hati, dendam dan muak selama ini dilampiaskan secara membabi buta. Secara sporadis, bentuk kekerasan ini terjadi di tiga wilayah penelitian, yakni Aceh, Poso dan Papua.
2. *Conspiracy* yaitu kekerasan politis yang terorganisir rapi an pertisipasi terbatas seperti pembunuhan politis terorganisasi, terorisme dalam skal kecil, kudeta dan pemberontakan. *Conspiracy* merupakan tindakan kekerasan yang sudah terencana dengan baik. Dalam konspirasi, aspek organisasi, sumber dana, elite dan partisipasi dari pengikutnya sudah menjadi hal yang penting. Beberapa kejadian di Aceh, Poso, dan Papua memperlihatkan konspirasi yang dilakukan pihak luar terhadap masyarakat atau mengorbankan masyarakat, sehingga masyarakat seringkali bingung kenapa semua terjadi dan jalan keluar yang harus diambil.
3. *Internal War* yaitu kekerasan poltis yang terorganisasi dan partisipasi popular dari luar bertujuan untuk menumbangkan rezim tertentu, merombak Negara. Pola yang ditempuh adalah kekerasan yang ekstensif, termasuk

terorisme, perang gerilya dalam skal besar, seperti perang saudara sampai kepada sebuah revolusi. *Internal War* adalah kekerasan politik yang telah terencana. Dalam konteks ini, kasus Aceh, Poso dan Papua, sudah sampai kekerasan pada tingkatan *Internal War* ini. Konflik di Aceh antara tentara dan polisi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), konflik antara Islam dan Kristen di Poso dan Konflik pengusaha, penguasa dan masyarakat di Papua memperlihatkan jaringan kekerasan sudah berlangsung di tiga tempat ini.

Kekerasan di tiga tempat ini menimbulkan ribuan orang meninggal dan milyaran kerugian materi sehingga sudah sampai pada tahap *Civil War*. Mereka yang berperang itu sesungguhnya merupakan warga sipil yang tidak dipersenjatai. Namun, jumlah yang banyak mereka miliki dapat menimbulkan korban dalam jumlah yang besar, terutama melalui pembakaran-pembakaran yang mereka lakukan di kedua belah pihak. Dalam *Internal War* ini sudah banyak persoalan yang mengikutinya, seperti provokator, pimpinan, pembakaran, sampai pada tahap pembunuhan missal. Kasus Aceh, Poso, dan Papua merupakan contoh yang menarik dari bentuk *Internal War*. Beberapa peristiwa yang terjadi di tiga daerah ini memperlihatkan tingginya tingkat kekerasan. Bahkan, untuk Aceh disebut sebagai bangsa yang memiliki "tradisi sejarah perang" yang panjang.

BAB III
METODE PENGABDIAN

A. Tempat dan Waktu Pengabdian

Penelitian pengabdian masyarakat social keagamaan ini dilaksanakan di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Karena lokasi tersebut adalah satu-satunya di Jember yang terjadi sebagaimana dimaksud dalamjudul peneletian.

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, Adapun jadwal penelitian atau *time schedule* kegiatannya sebagaimana diuraikan dalam Tabel 3 (terlampir).

B. Metode Pengabdian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosial keagamaan tentang pengembangan pendidikan kaagamaan dengan menggunakan *pendekatan kualitatif*, dengan mendasarkan data pada kajian literatur, dokumen rekaman produk kebijakan dan data lapangan. Pendekatan ini berusaha menyingkap bagaimana *peace building* berbasis komunitas dalam penyelasaian konflik bernuansa agama di Puger kulon dan puger wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Oleh

karena itu, pendekatan holistik yang berupaya memahami sesuatu dari sudut pandang keutuhannya, sesuai untuk dipergunakan dalam penelitian ini.

Apabila dilihat dari aspek permasalahan yang dikaji, yaitu *peace building* berbasis komunitas dalam penyelasaian konflik bernuansa agama di Puger kulon dan puger wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember, maka penelitian ini memerlukan bantuan metodologi kualitatif untuk menjamin diperolehnya pemahaman terhadap realitas lapangan. Tentu hal ini tidak dapat diungkap dengan mengandalkan angka-angka kuantitatif. Sehubungan dengan itu, gabungan antara pendekatan rasionalistik dan fenomenologis sesuai untuk diterapkan. Maksud dari pendekatan rasionalistik adalah membangun kebenaran informasi keilmuan yang bertumpu pada kecermatan fikir, ketajaman nalar, dan kekuatan logika argumentatif, baik ketika menggali data, melakukan analisis, dan memaparkan hasil penelitian. Sementara itu pendekatan fenomenologis adalah bagaimana penelitian ini memiliki fleksibilitas sedemikian rupa dalam memandang permasalahan yang menjadi fokus penelitiannya sehingga kebenaran informasi keilmuan yang diperoleh semaksimal mungkin sesuai dengan realitas alamiah lapangan[1].

2. Sumber data dan Subjek Penelitian

Sumber data penelitian diambil dari *subjek penelitian* yang terlibat secara intens, langsung maupun tidak langsung dalam *objek penelitian*, yaitu berupa informan, dokumen dan segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sumber data/informasi dalam penelitian ini. Subjek yang dimaksud dalam penelitian

[1] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research*. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2003), 12.

ini adalah orang, hal, benda atau segala sesuatu tempat variabel penelitian melekat, orang yang dapat memberikan jawaban atau keterangan tentang variabel, orang, atau benda di mana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti. Adapun yang dimaksud objek dalam penelitian ini adalah pokok persoalan yang diteliti, yaitu: *Peace Building* berbasis komunitas dalam penyelasaian konflik bernuansa agama di Puger kulon dan puger wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember".

Untuk mendapatkan subjek penelitian yang sesuai dengan sasaran, perlu memperhatikan kapasitas atau kedudukan masing-masing pihak untuk dipastikan menjadi subjek penelitian. Subjek penelitian ini meliputi: a) dokumen, undang-undang/peraturan pemerintah, buku, leafleat, poster, dan lain-lain, b) Tokoh Masyarakat, c), Pemerintah desa, d). tokoh Pemuda dan Perempuan sebagai sebagai masyarakat dampingan.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah literatur dan lapangan. Literatur dapat berupa buku, jurnal, undang-undang, peraturan pemerintah atau dokumen lainnya, yang akan dijadikan referensi sekunder. Sementara itu data lapangan dapat berupa transkrip wawancara atau catatan lapangan (*field-notes*) hasil observasi, yang akan dipakai menjadi data primer. Bahan literatur tersebut dimaksudkan untuk memfokuskan diri pada persoalan perdamaian berbasis komunitas dalam penyelasaian konflik bernuansa agama di Puger Kulon dan Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk meraih data yang diperlukan, dilakukan melalui metode observasi lapangan, wawancara mendalam dan studi dokumenter yang dilakukan secara *triangulation*. Jadi ada proses *check and recheck*, bahkan hasilnya akan memantapkan dalam diskusi kelompok terarah (*focus group discussion, atau FGD*), sehingga tujuan untuk meraih kedalaman dan keutuhan data dapat terpenuhi.

Mengingat program *Participatory Action Research* (PAR) ini adalah proses pemberdayaan masyarakat (*empowerment society*) akan masalah-masalah yang dihadapi, untuk dipahami dan dicarikan solusi pemecahannya sendiri oleh mayoritas masyarakat, maka fokus pemberdayaannya melalui langka-langkah berikut:

Langkah 1: *Preliminari Mapping*. Tahap ini digunakan untuk identifikasi masalah melalui beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pertemuan dengan tokoh masyarakat yang terlibat dalam konflik. Teknik ini dipergunakan untuk menjaring informasi sebanyak-banyaknya dari masyarakat dampingan. Agar hasil penjajakan informasi benar-benar bisa berguna, maka cara penjajakan harus baik dan benar. Salah satu cara yang efektif dalam penjajakan informasi dengan menggunakan teknik *Focus Group Discussion* (FGD), yakni sebuah metode yang berfungsi untuk memotret sebuah kelompok masyarakat secara cukup mendalam, cepat, murah dan terpercaya, asal dilakukan dengan baik dan benar.
b. Observasi lingkungan bersama masyarakat. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data tambahan dan juga

untuk kepentingan *corss-check* dalam proses triangulasi. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dari FGD bisa dibuktikan akurasinya melalui data lain.

c. Wawancara Mendalam (*Indept Interview*) dengan beberapa tokoh kunci *(key person)*. Teknik ini juga berfungsi sebagai bagian dari *preliinary mapping* dalam rangka menjaring data yang relefan dengan aksi sosial yang akan difasilitasi. Data yang diperoleh melalui teknik ini juga sangat berguna untuk proses triangulasi.

Langkah 2. Sistem Pembelajaran Bersama. Mekanisme ini diterapkan untuk mendorong pembelajaran bersama di antara anggota kelompok yang berkepentingan *(multi-stakeholder)* dalam program ini. Adapun teknik pelaksanaan langkah kedua ini adalah:

a. Pertemuan kelompok Komunitas, sebagai mekanisme untuk merenung, membangun kelompok dan perencanaan bersama. Melalui forum ini, masing-masing pihak didorong untuk mengenali problem yang mereka hadapi dan difasilitasi untuk merumuskan sebuah formula solusi secara bersama-sama.

b. Benchmarking; juga bagian dari mekanisme perenungan, membangun kelompok dan perencanaan bersama terhadap beberapa tantangan dan kendala yang ingin dipecahkan secara kolektif.

Tentu saja dalam langkah sistem pembelajaran bersama, anggota tim peneliti memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam forum kegiatan.

*Langkah 3***.** Aksi Sosial. Tahapan ini merupakan salah satu *expected target* dari Program *Participatory Action Research* (PAR) dan merupakan jantung kegiatan. Setelah melalui

langkah sistem pembelajaran bersama, maka rencana aksi strategis yang ditentukan secara bersama direalisasikan dalam bentuk kegiatan. Metode belajar yang disepakati bersama oleh masyarakat dampingan bisa dalam bentuk DIKLAT, *workshop*, maupun dalam format yang lain. Dengan demikian, target transformasi sosial yang menjadi cita-cita Program *Participatory Action Research* (PAR) dapat benar-benar terwujud secara nyata. Karena memang kegiatan ini melibatkan seluruh komponen masyarakat dampingan sebagai penyenggara kegiatan.

D. Teknik Analisis Data

Data data dalam penelitian ini dianalisis dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Pada tingkat pelaksanaannya, analisis data berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Strategi analisis bertolak dari data dan bermuara pada simpulan-simpulan umum[2]. Pada penelitian ini, kesimpulan umum dapat berupa kategorisasi atau proposisi. Berdasarkan strategi analisis data yang digunakan, dalam rangka membentuk kategorisasi problem maupun proposisi, maka analisis data dilakukan secara deskriptif, yakni integrasi pendidikan formal dan pendidikan diniyah salafiyah terhadap santri Assuniyyah Kencong Jember sebagai antisipasi *ouput* pesantren di era regulasi pendidikan nasional, setelah ketemu, dijadikan sebuah kerangka teoritik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan analisis model interaktif dari *Miles and Huberman*,[3] yang membagi kegiatan analisis menjadi empat

[2] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research*. (Yogyakarta: Rake Sarasin,2003), 209.

[3] Matthew B. Miles & Michael A. Huberman, *Qualitative Data Analysis, a Sourcebook of New Methods*, (London & New Delhi: Sage Publications, 1984), 10.

bagian, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Model ini dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut :

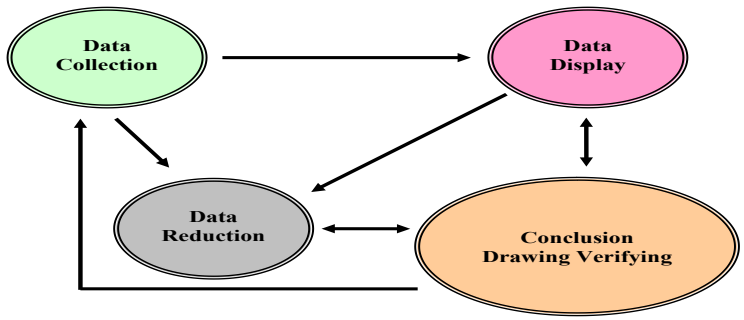

Gambar 2. Analisis Model Interactive dari Miles dan Huberman

Mulai dari kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi adalah merupakan proses siklus dan interaktif. Oleh karena itu dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus dan merupakan rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusul.

Kegiatan untuk melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang *peace building* berbasis komunitas dalam penyelasaian konflik bernuansa agama di Puger Kulon dan Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember tentu menghasilkan data yang banyak, kompleks dan bercampur-baur. Oleh karena itu perlu direduksi untuk kemudian dipilih mana yang layak dan tepat untuk disajikan. Proses pemilihan data difokuskan pada data yang mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan sejak peneliti berusaha mencari makna data yang telah terkumpul, dalam hal ini dicari tema hubungan dan kesamaan dari hal-

hal yang sering timbul. Dari data yang diperoleh, peneliti mencoba untuk mengambil kesimpulan, selanjutnya kesimpulan tersebut dimantapkan dengan bertambahnya data melalui verifikasi.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi serta catatan reflektif, kemudian mengklasifikasikan data yang penting diantara yang kurang penting.
2. Mendeskripsikan data yang telah diklasifikasi untuk penelaahan lebih lanjut, dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian.
3. Menelaah deskripsi dan membandingkannya dengan teori yang menjadi acuan peneliti, termasuk merevisi teori, dan
4. Hasil tersebut kemudian dipakai untuk menguji validitas hasil angket (jika ada).
5. Kesimpulan penelitian dibuat berdasarkan hasil tersebut (point 4).

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara (*interview guide*), pedoman observasi (*observation guide*), peralatan dokumentasi, dan lain sebagainya yang sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Kualitas instrumen penelitian sangat menentukan terhadap kualitas data yang akan terkumpul, oleh karena itu keuletan, ketelitian, kecermatan, kesabaran, dan kemampuan bergaul serta berbaur secara adaptif dan kooperatif dengan informan atau responden harus dimiliki oleh seorang peneliti

kualitatif. Sedangkan kualitas instrumen *non-human* dapat diwujudkan dengan memperhatikan langkah-langkah penyusunan instrumen antara lain: 1) memahami langkah-langkah secara umum dalam menyusun instrumen pengumpul data, 2) mengetahui hal-hal yang harus dipertimbangkan serta cara merumuskan butir-butir instrumen pengumpul data, 3) mengetahui komponen-komponen kelengkapan instrumen.

BAB IV
TEMUAN PENELITIAN

A. Konflik Bernuansa Agama di Puger Jember

Kecamatan Puger merupakan mempunyai luas wilayah 283. 890 Km dengan ketinggian rata-rata 12 m dari atas permukaan laut. Kecamatan Puger terdiri dari 12 desa yaitu: Wringin Telu, Purwoharjo, Mojomulyo Puger Kulon, Puger Wetan, Mojosari, Grenden, Kasiyan, Mlokorejo, Wonosari, Jambearum, Bagon. Seluruh Desa berkualifikasi Desa Swadaya. Desa Puger Kulon ini terletak berdampingan dengan Desa Puger Wetan. Desa ini juga berada kurang lebih 40 km dari pusat kota Jember kearah selatan. Luas Desa Puger Kulon sekitar 388.800m². Desa Puger Kulon areal persawahan luasnya 6,955m² dan areal ladang 21,394m². Di desa Puger kulon ini selain memiliki pesisir,juga memiliki tambak. Pada tahun 2009, Jumlah penduduk desa puger kulon, jenis kelamin laki-laki berjumlah sekitar 6842 orang, perempuan 6856 orang sedangkan jumlah kepala keluarga sekitar 4006 KK. Jadi secara keseluruhan jumlah penduduk pada tahun 2009 sekitar 13.698 orang.[1] Jumlah penduduk 13.195 dengan 98% beragama Islam dan sisanya beragama Katolik. Mata pencariannya antara lain nelayan, petani, wiraswasta dan ada juga sebagian PNS/TNI. Adapun tempat

[1] Data dioleh dari kantor desa Puger Kulon Jember

peribadatan di desa ini yakni 7 masjid dan sekitar 40 Mushalla. Sarana pendidikan ada 6 SD/MI/Se-Derajat, 3 SMP/MTs/Se-Derajat dan 1 SMK[2]. Darus Solihin merupakan satu-satunya pesantren di Desa yang terkenal dengan watak agak kasar, hal ini dipengaruhi karena cuaca yang tingkat kepanasannya cukup tinggi, yakni berkisar 25^0C – 35^0C. Pondok pesantren ini diasuh oleh Habib Ali bin Umar Al Habsy.[3] Khusus di daerah dusun Mandaran 1 dan Mandarin 2 bahasa yang digunakan bisa dikatakan *fifty-fifty* antara bahasa Jawa dan bahasa Madura bahkan budayanya pun budaya Madura dan sebagian kecil bahasa Indonesia. Sedangkan untuk dusun-dusun yang lain bahasanya lebih didominasi bahasa Jawa.[4] Konflik antar kelompok masyarakat di Puger yang bernuasa ajaran agama sebenarnya bukan hanya sunni-syiah saja dan bukan pula konflik baru. Bibit-bibit masalah ini sebenarnya sudah ada sejak awal tahun 198-0-an, bahkan jauh sebelum itu.

B. Gelang Merah Dan Wahidiyah: Dinamika Lokal

Awal tahun 1980-an, pernah muncul kelompok pengajian Gelang Merah, yang kemudian 'di-cap' sesat oleh masyarakat. Setelah mati puluhan tahun, awal tahun 2011 kelompok ini muncul lagi, dan ditutup paksa oleh masyarakat. Meskipun sudah tidak terdengar lagi, kelompok Gelang Merah sampai saat ini masih tetap ada, hanya saja beberapa anggotanya pindah ke sejumlah desa di pinggiran Puger. Tak lama kemudian, muncul lagi konflik baru antara masyarakat dengan kelompok pengajian Wahidiyah. Dengan

[2] Data dioleh dari kantor desa Puger Kulon Jember

[3] Ibid, lihat juga www.pemkabjember.go.id/v3/kecamatan/puger.php

[4] Wawancara dengan Nur Hasan (kepala desa Puger Kulon) dan Aliyul Hadi (Kepala Dusun Gedangan sekaligus suami dari kepala dusun Mandaran 2)

alasan ajarannya sesat, warga menolak kehadiran kelompok pengajian ini di Puger. Pertengahan tahun 2012, ratusan warga Puger menghadang dan merusak kendaraan jamaah Wahidiyah yang akan melaksanakan pengajian di Puger. Meski warga menolak dan melabeli sesat, sampai saat ini Jamaah Wahidiyah tetap melakukan kegiatan pengajian meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Konflik berbungkus isu Sunni-Syi'ah muncul dan diberitakan di media dua tahun lalu. Warga menilai pengajian yang dilakukan oleh Habib Ali bin Umar Al-Habsyi yang dianggap menjelek-jelekan para Sahabat Rasulullah. Atas dasar inilah warga meng-klaim bahwa ajaran Habib Ali adalah ajaran Syi'ah. Situasi memanas saat belasan orang yang diduga santri Habib Ali melakukan penyerangan terhadap Ustadz Fauzi, salah seorang tokoh masyarakat Puger. Aksi penyerangan ini menjadi titik awal meningkatnya konflik yang mengatasnamakan Sunni dan Syi'ah. Lantas apa latar belakang sesungguhnya konflik Sunni-syi'ah ini.

C. Fenomena sosial dari Santet Sampai Rivalitas Tokoh

Konflik antara masyarakat yang berbungkus isu Sunni dan Syi'ah tidaklah murni persoalan perbedaan keyakinan. Perbedaan keyakinan memang menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik, namun bukan pemicu utama. Ada dua masalah lainnya yang selama ini tersembunyi namun menjadi penyebab penting munculnya konflik Sunni-Syi'ah di Puger. Habib Ali bin Umar Al-Habsyi bukanlah warga asli Puger, beliau adalah pendatang yang membuka pesantren dan mengajar mengaji anak-anak kecil di mushollah kecil depan

rumahnya sejak tahun 1980-an. Seiring perkembangan jaman, mushollah yang dulunya kecil sekarang sudah menjadi Masjid, bahkan santri Habib Ali bin Umar Al-Habsyi berkembang menjadi ratusan. Bahkan saat ini sudah berdiri pesantren Darus Sholihin dan sejumlah sekolah.

Perkembangan Pesantren Darus Sholihin ini memunculkan rivalitas dan perebutan pengaruh antara Habib Ali bin Umar Al-Habsyi dan Sejumlah Kyai dan tokoh agama yang lebih lama bermukim di Puger. Sayangnya, dalam perkembangannya Pesantren Darus Sholihin kurang diterima di kalangan ulama lokal dan bahkan dalam banyak hal memposisikan dirinya sebagai pesaing. Salah satu contohnya adalah pengajian akbar dalam rangka Maulud Nabi. Meskipun ulama lokal telah mengadakan pengajian akbar, namun Pesantren Darus Sholihien terkesan enggan untuk bergabung dengan pengajian yang sudah ada dan mengadakan Pengajian tandingan. Kondisi semacam ini memunculkan perpecahan dalam masyarakat antara pendukung ulama lokal dan penganut Habib Ali. Selain rivalitas, ada masalah lain yang menjadi penyebab munculnya konflik. Ustadz Fauzi adalah putera tokoh paling berpengaruh di Puger. Ketika ayahandanya meninggal, Ustadz Fauzi dipanggil pulang dari pesantren tempat ia belajar oleh keluarga dan masyarakat sekitarnya dan diminta untuk meneruskan ayahnya mengajar di Mushollah di sebelah rumahnya. Saat Ustadz Fauzi pulang, muncul isu bahwa Ustadz Fauzi adalah tukang santet. Tidak diketahui siapa yang menyebarkan isu tersebut, sampai-sampai Ustadz Fauzi muda ini dipanggil oleh Habib Ali untuk mengklarifikasi tuduhan itu. Sampai saat ini pengikut Ustadz Fauzi masih beranggapan bahwa Habib Ali adalah penyebar isu santet itu. Dilain pihak, pengikut Habib Ali mengklaim

bahwa pengikut Ustadz Fauzi sengaja memunculkan isu santet itu untuk mempopulerkan Ustadz Fauzi.

Sunni-Syi'ah Hanya Polesan ataukah bukan? Sunni dan Syi'ah hanyalah bungkus dan tidak bisa digunakan sebagai rujukan yang akurat untuk mengurai persoalan di Puger. Selain Sunni dan Syi'ah masih ada bungkus-bungkus lain yang kerapkali digunakan oleh media dan aparat pemerintahan untuk menjelaskan konflik masyarakat di Puger, Antara lain adalah Wahidiyah dan Gelang Merah. Bungkus-bungkus ini tidaklah menjelaskan persoalan yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Penyelesaian masalah yang hanya merujuk bungkus saja tidak akan pernah menyelesaikan masalah secara tuntas. Dalam hal konflik antara warga Puger dan Pesantren Darus Sholihin hendaknya media dan pemerintah tidak lagi menyebutnya sebagai konflik antara Sunni dan Syi'ah. Karena munculnya konflik ini bukan semata mata karena perbedaan ajaran, tetapi ada beberapa masalah lain yang lebih mendasar dan lebih rumit. Komunikasi yang intensif antara kedua belah pihak yang bertikai menjadi persyaratan mutlak untuk menyelesaikan masalah. Pemerintah dan MUI sebaiknya menjadi mediator yang baik untuk menyelesaikan persoalan, salah satunya dengan tidak memberikan cap 'sesat dan menyesatkan' kepada kelompok masyarakat tertentu.[5]

Rangkaian Peristiwa Konflik Bernuansa Sunni-Syiah Puger, tragedi bentrokan di Puger, Jember, membuat sebagian orang teringat pada Kasus Sampang pada tahun lalu. Akar masalah bentrokan yang terjadi di Jember dan di Sampang adalah penolakan warga masyarakat terhadap ajaran syi'ah yang sporadis dan berselimut dalam selubung ajaran ahlu

[5] http://politik.kompasiana.com

sunnah. Khusus di daerah Puger Kabupaten Jember, kasus seperti ini sering terjadi, tapi terdapat dua peristiwa besar yang sampai saat ini terjadi. Konflik ini antara kelompok pengikut Habib Ali Al Habsyi dan pendukung Ustadz Fauzi sebenarnya terkonsentrasi di Desa Puger Kulon saja. Ustadz Fauzi tinggal di Dusun Mandaran 2 dan Habib Ali di Dusun Mandaran 1.

Kasus Tahun 2012: Insiden Pra dan Pasca Pengajian[6]*'Isu* penyerangan pada tanggal 7 Juni 2012 sengaja dihembuskan oleh pihak Ust. Ali yang berfaham Syi'ah, agar pengajian tersebut menjadi gagal. Mengingat pengajian tersebut akan dihadiri oleh Habib Muhdhor bin Muhammad al-Hamid yang sangat vokal terhadap kelompok Syiah dan ajarannya (anti-Syiah). Untuk lebih jelas peristiwa tersebut, ini dapat dilihat sebagai berikut: ***Malam Puncak Acara Pengajian.***Sebelum adanya acara pengajian di desa Puger Wetan, Sebelumnya, Gus Yak telah menyampaikan permintaan tersebut ketika memimpin rapat koordinasi antara PCNU Kencong dan para Kyai, Habaib serta Tokoh Masyarakat Puger di kediaman H. Arif Gerenden, Puger (01/6/2012), yang juga merupakan permintaan resmi dari PCNU Kencong kepada pemerintah. Ada enam butir tuntutan yang disampaikan PCNU Kencong kepada pemerintah, di antaranya[7]:

1. Melarang Ustad Ali Al Habsy dan kelompoknya mengajarkan baik secara lisan, tulisan maupun melalui media elektronik yang berseberangan dengan faham Ahlussunnah wal Jamaah.

---

[6] Deskripsi diolah dari berbagai sumber, data dari Sekretaris *Lajnah Ta'lif wa Nasyr (*LTN) NU Jember, MUI Puger, MWC NU Puger dan media-media *online* seperti http://regional.kompasiana.com/2013/09/18/pernyataan-ketua-pmii-jatim-terkait-tragedi-puger-adalah-asbun-593695.html

[7] http://nukencong.or.id

2. Kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dimohon agar tidak memberikan peluang penyebaran faham Syi'ah di Indonesia, karena penyebaran faham Syi'ah di Indonesia yang penduduknya berfaham ahlu al-sunnah wa al-jama'ah sangat berpeluang menimbulkan ketidakstabilan yang dapat mengancam keutuhan NKRI.
3. Kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dimohon agar melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain membekukan/ melarang aktivitas Syi'ah beserta lembaga-lembaga yang terkait.
4. Kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dimohon agar bertindak tegas dalam menangani konflik yang terjadi, tidak hanya pada kejadiannya saja, tetapi juga faktor yang menjadi penyulut terjadinya konflik, karena penyulut konflik adalah provokator yang telah melakukan teror dan kekerasan mental sehingga harus ada penanganan secara komprehensif.
5. Kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dimohon agar bertindak tegas dalam menangani aliran menyimpang karena hal ini bukan termasuk kebebasan beragama tetapi penodaan agama.
6. Kepada umat Islam diminta untuk tidak mudah terprovokasi melakukan tindakan kekerasan (anarkisme), karena hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam serta bertolak belakang dengan upaya membina suasana kondusif untuk kelancaran dakwah Islam.

Kasus Tahun 2013: Insiden Kerusuhan karnaval[8]

Sebelum terjadinya peristiwa berdarah pada hari Rabu, 11 September 2013, sebenarnya sudah ada pertemuan BAKESBANGPOL pada hari Senin, 09 September 2013, Jam: 19.00 Wib untuk mencegah agar tidak terjadi bentrokan karena khawatir memicu bentrok seperti yang terjadi tahun 2012 lalu. Pertemuan itu dilakukan oleh Muspida, PCNU Jember, PCNU Kencong, MUI Jember, Muspika Puger di hotel Aston. Pertemuan tersebut membahas pelaksanaaan Karnaval yang akan diadakan oleh PP. Darus Shalihin Puger pimpinan Ust. Ali Al-Habsyi Puger.

Rapat koordinasi tersebut (09/09/2013) menghasilkan keputusan 3 poin;

1. Rencana Karnaval PP Darussholihin pada tanggal 11 September 2013, tidak diijinkan dilaksanakan di Puger Kulon, Agar tokoh ormas keagamaan turut menjaga kondusifitas Puger dan tidak mengeluarkan statemen yang provokatif, yang dapat memancing kemasarahan massanya,
2. Jika pihak PP Darussholihin memaksakan kehendak, maka dilakukan pemblokiran dengan barikade di jalan masuk areal pesantren dan pasukan secukupnya untuk mencegah masyarakat.[9]

Karena karnaval yang akan diselenggarakan pondok pesantren Darus Solihin (Ust Habib Ali bin Umar Al Habsyi) sudah ada indikasi akan memicu kemarahan masyarakat sekitar, akan tetapi pihak Ust. Ali tetap mengadakannya. Meskipun sudah ada kesepakatan seperti itu, tetapi akhirnya

[8] Deskripsi diolah dari berbagai sumber, data dari Sekretaris *Lajnah Ta'lif wa Nasyr (*LTN) NU Jember, MUI Puger, MWC NU Puger dan media-media *online* seperti http://regional.kompasiana.com/2013/09/18/pernyataan-ketua-pmii-jatim-terkait-tragedi-puger-adalah-asbun-593695.html

[9] Data diperoleh dari bapak Mudafir selaku ketua MWCNU Puger

peristiwa berdarah itu terjadi karena ketua panitia karnaval memaksa untuk melaksanakan acara karnaval tersebut dan menyerukan melalui pengeras suara agar polisi tidak menghalangi jalan. Dengan kejadian tersebut, masyarakat pendukung Ustadz Ali terprovokasi dengan perbuatan panitia karnaval yang melanggar kesepakatan tersebut. Untuk lebih jelas peristiwa tersebut, di bawah ini akan didiskripsikan kronologi terjadinya aksi kerusuhan pada pelaksanaan karnaval di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu, 11 September 2013. Urutan peristiwa berdasarkan pada informasi yang dihimpun *Tempo*, termasuk dari pihak Kepolisian Sektor Puger dan Kepolisian Resort Jember dan dipadukan dengan media NU *On Line* Kencong Jember (nukencong.or.id dan www.nu.or.id), beritajatim.com, tribunnews.com, antaranews.com, Radar Jember dan sebagainya.

D. Resolusi Konflik: Pemecah Masalah Keagamaan

Resolusi konflik yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah upaya untuk membangun hubungan baru dan bertahan lama di antara kelompok Islam (Sunni-Syiah) yang pernah berkonflik, yaitu dengan mengacu pada berbagai strategi penanganan konflik. Tujuannya adalah mencapai suatu kesepakatan untuk mengakhiri konflik maupun mencari formula baru karena masih adanya berbagai perbedaan pemahaman terhadap sumber dan penyebab konflik. Atau dengan kata lain resolusi konflik adalah upaya pengelolaan keharmonisan hubungan di antara kelompok yang berkonflik. Adapun beberapa upaya resolusi konflik Sunni-Syiah yang ditempuh oleh berbagai kalangan pasca konflik, antara lain: 1) rapat koordinasi di tingkat muspida dengan melibatkan

berbagai elemen dalam rangka meredam konflik yang lebih luas; 2) meningkatkan intensitas komunikasi antar pihak yang berkonflik dalam upaya mengantisipasi isu-isu yang sifatnya provokatif; 3) menindak tegas para pelaku dan otak kerusuhan melalui upaya mencari, menahan/menangkap serta menghukum sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku; 4) menghimbau kepada masyarakat Puger khususnya desa Puger Kulon agar tetap tenang dan sabar dan untuk masa-masa yang akan datang 5) memberikan bantuan kepada korban atas kerugian harta benda maupun jiwa.[10]

Untuk lebih jelas, akan diuraikan sebagai berikut; Upaya-upaya terus dilakukan oleh beberapa pihak, yakni masyarakat, perangkat desa, ormas, pemerintah kabupaten bahkan tingkat provinsi. Semua pihak memiliki strategi masing-masing dalam menyikapi konflik tersebut. Di tingkat masyarakat dan perangkat desa menggunakan strategi *inaction*, yakni menganggap konflik tak pernah ada, sehingga masyarakat dan perangkat desa ketika diminta untuk menjadi narasumber sangat sulit untuk memberikan keterangan terkait konflik tersebut, hal ini mereka lakukan karena konflik yang terjadi dirasa bukan kapasitas mereka. Masyarakat yang pengetahuannya bisa dikatakan awam (tidak ahli khususnya dalam memahami sunni-syi'ah). Hal tersebut senada seperti yang dikatakan oleh Aliyul Hadi;

> "Masyarakat sana (dusun Mandaran I dan II) termasuk kategori awam dalam hal konflik ini, jadi kamu akan sulit untuk mencari data kesana, bahkan bisa jadi kamu akan dimarahin. Karena semua orang tahu bahwa konflik ini ada unsur Sunni-Syi'ah, kami disini tutup mulut karena yang sangat paham dengan hal-

[10] www.beritajatim.com

> hal seperti itu adalah pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Puger dan Jember, mereka yang mengkajinya, kami disini hanya mengikuti saja. Karena jika suatu perkara dipasrahkan kepada yang bukan ahlinya, bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah."[11]

Strategi resolusi selanjutnya yakni pada tatanan Pemerintah Kabupaten dan Provinsi sudah dilakukan beberapa kali upaya *problem solving* yakni dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik untuk mendiskusikan permasalahan dan mencari titik temu agar konflik tidak mengalami eskalasi dan berkepanjangan.[12] Meluasnya konflik sering disebabkan oleh karena gagalnya upaya-upaya penghentian kekerasan, atau dalam beberapa kasus tampak adanya indikasi "pembiaran" oleh actor-aktor Negara. Asumsi pembiaran ini, karena pada situasi konflik seringkali berlu diperkuat oleh resolusi konflik, pengembalian hal-hak pengungsi (korban), tidak adanya perlucutan senjata dan senjata api dikuasi oleh pihak-pihak yang bertikai/berkonflik, atau hanya diisi oleh kegiatan-kegiatan "perdamaian/perjanjian-perjanjian damai" yang bersifat *top-down* daripada *bottom-up* sehingga hasilnya cenderung tidak memuaskan atau bahkan mengalami kegagalan.[13] Hal tersebut selaras dengan pernyataan Ketua MUI Jember (Prof. KH. Abd. Halim Soebahar,MA) yang setuju dengan pernyataan Bupati MZA Djalal, bahwa perdamaian hanya bisa diciptakan oleh warga Puger sendiri.

> "Bukan dengan cara top down, dari bawah ke atas, dari pemerintah. Saat ini masyarakat masih labil, tidak bisa dipaksakan,"[14]

[11] Wawancara, 16 Pebruari 2014
[12] Jadwal dan hasil pertemuan sebagaimana terlampir
[13] Syafuan Rozi, *Kekerasan Komunal*, 5
[14] www.beritajatim.com

Tidak jauh beda dengan pernyataan tersebut, mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi meminta kepada semua pihak agar menjaga ketenangan masyarakat ketika takziah kepada keluarga almarhum korban kerusuhan Puger Eko Mardi Santoso;

> "Saya berharap kerusuhan yang terjadi di Puger jangan sampai terulang kembali, sehingga semua pihak harus mencari akar persoalannya untuk memberikan solusi kedua belah pihak,"

Akan tetapi Resolusi mencapai titik puncak, karena juga merupakan keinginan banyak pihak agar konflik Puger lekas terselesaikan. Yakni pada hari Rabu (18/09/2013). Dua elit kelompok di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Jember, Jawa Timur sepakat melakukan "gencatan senjata". Kesepakatan itu terjadi dalam mediasi awal upaya perdamaian di Puger yang dilakukan di Aula UPTD Pendidikan Puger. Dua kubu yang berkonflik yakni Habib Ali bin Umar Al Habsyi bin Umar Al Habsyi, pimpinan Pondok Pesantren Darus Sholihin, dan Ustadz Ahmad Fauzi Syamsul Hadi sepakat berdamai. Kesepakatan damai itu disaksikan Bupati Jember MZA Djalal, jajaran pimpinan Kepolisian Resor Jember, dan Komando Distrik Militer 0824. Mediasi ini menjadi titik awal rekonsiliasi dua kelompok tersebut. Hasil mediasi dituangkan dalam kesepakatan di selembar kertas bermeterai. Kesepakatan damai itu diwakili para elitnya masing-masing yang dimediasi oleh Bupati Jember, MZA. Djalal. Tempat kesepakatan damai tersebut berlangsung di Aula Unit Teknis Pelaksana Dinas Pendidikan Puger. Mereka bersepakat bahwa tragedi konflik Puger tidak akan terulang dan mereka berjanji

untuk melupakan konflik, menjaga perdamaian, keamanan, dan ketertiban.

Menurut MZA. Djalal, kesepakatan damai antar kedua kubu itu merupakan perdamaian awal dan perlu diikhtiarkan terus agar menjadi perdamaian permanen. Kepada sejumlah media, Djalal mengungkapkan

> sebulan ke depan kedua kubu juga sepakat tidak akan melakukan kegiatan yang melibatkan massa, tidak saling memprovokasi, dan tidak akan melibatkan orang atau pihak lain dari luar Puger.[15]

Ada beberapa poin dalam kesepakatan itu. Kelima poin itu yaitu sebagaik berikut:

1. Kedua belah pihak menyadari dan menyatakan prihatin atas konflik yang terjadi pada Rabu (11/9/2013) yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana permukiman, peribadatan, lembaga pendidikan, perahu nelayan, korban luka, hingga hilangnya nyawa manusia yakni Eko Mardi Santoso.
2. Kedua belah pihak menginginkan terciptanya perdamaian, keamanan, ketertiban demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
3. Sambil menunggu ikhtiyar perdamaian permanen yang diupayakan Bupati Jember dalam kurun waktu satu bulan ke depan:
   a. Kedua belah pihak berjanji untuk tidak melakukan kegiatan pengerahan massa, mengadakan kirab, karnaval, dan kegiatan masal apapun di jalan raya dan fasilitas

[15] http://www.suarasahabat.com/2013/09/18/alhamdulillah-two-camps-in-conflict-puger-agreed-peace/, data ini diunduh pada hari kamis 24 Pebruari 2014 jam 10.45 wib

umum, sampai situasi masyarakat tertib, aman, dan terkendali.

b. Kedua belah pihak tidak akan saling provokasi, fitnah, intimidasi dan saling serang baik secara fisik maupun non fisik dari pihak satu terhadap pihak lainnya.

c. Kedua belah pihak juga tidak akan melibatkan orang/ pihak lain di luar Kecamatan Puger untuk penyelesaian konflik tanpa persetujuan bupati Jember.

d. Kedua belah pihak sepakat dengan penegakan hukum.

4. Jika dalam waktu satu bulan dipandang belum terwujud perdamaian permanen maka akan ada evaluasi.

5. Kedua belah pihak berkewajiban menyosialisasikan kesepakatan kepada jamaah masing-masing.

Oleh karena itu di tengah upaya menuju perdamaian permanen, kedua belah pihak diharap tidak mengerahkan massa, tidak mengadakan kirab, karnaval, atau kegiatan massa di jalan raya dan fasilitas umum. Tidak saling provokasi, fitnah, intimidasi dan saling serang secara fisik maupun non-fisik. Atas terwujudnya kesepakatan damai tersebut, Habib Isa Mahdi Al Habsy yang mewakili kubu Pondok Pesantren Darussolihin mengaku sangat bersyukur dengan terciptanya kesepakatan perdamaian itu. Sedangkan kubu lainnya yang diwakili Ustad Fauzi menjamin bahwa seluruh pengikutnya akan memegang kesepakatan damai tersebut. *"Ya, kita ingin semua konflik diakhiri dan siap mengikuti semua poin kesepakatan itu,"* Selesai menandatangani perjanjian damai, Habib Isa dan Fauzi berpelukan dengan disaksikan pejabat Muspida Jember serta Muspika Puger.[16]

[16] Data ini diunduh pada hari kamis 20 Pebruari 2020 jam 10.45 wib

E. Partisipasi Kelompok Komunitas *Peace Building*

Fenomena intoleransi di negeri ini masih menjadi momok yang mengiringi perjalanan bangsa. Rasa saling menghormati dan menghargai akibat keberbedaan masih mudah meletup dan berimplikasi lahirnya konflik, baik antar person dan pribadi, hingga konflik kelompok dan komunal. Proses diskriminasi yang berujung eksklusi menjadi rangkaian berikutnya dari hilangnya pernghargaan pada keberagaman dan perbedaan tersebut. Kehadiran komunitas yang dilakukan oleh program pengabdian inilah untuk melakukan upaya-upaya yang akan memberikan pemahaman tentang pentingnya hidup kebersamaan dan tidak selalu curiga bahkan benci kepada setiap kelompok kegamaan tertentu.

Lahirnya kelompok pengabdian dengan adanya komunitas di Puger yang dilaksanakan oleh Tim STAI Al Falah As Sunniyyah Kencong Jember guna melakukan pengabdian yang fokusnya lebih pada pengabdian berbasis sosisologi Islam (PM-SI) partisipsi perguruan tinggi merupakan sebuah kewajiban untuk mengabdi kepada kepada masyarakat sebagai salah satu dari tri darma perguruan tinggi. Untuk itu kegiatan yang dilakukan di desa Puger yaitu kurang lebih 3 bulan dengan melakukan pembentukan komunitas dan FGD, Pelatihan/Wrokshop serta action dilapangan guna melaksanakan program tersebut secara bersama-sama.

Dalam pelaksanaan pelatihan komunitas juga dibekali dengan teori-teori yang menjadi modal pemahaman tentang penyelesian konflik melalui komunitas seperti:

F. Modul *Peace Building* Berbasis Komunitas di Puger

Sejatinya, bangsa Indonesia telah terbiasa dengan kehidupan yang beragam atau berbeda satu dengan lainnya. Keberagaman adalah fakta sosial bangsa Indonesia. Jika Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah kesepakatan, ia adalah wadah kesepakatan atas keberagamaan itu. Untuk itu, Ia tidak bisa dibantah dan diseragamkan. Penyeragaman berarti pengkhianatan atas jati diri bangsa.

Semua upaya/cita-cita kebangsaan, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan, ataupun agama harus memberikan penghormatan terhadap keberagaman bangsa. Jika tidak, maka upaya itu telah mencederai identitas Indonesia sebagai sebuah bangsa (*nation state*). Ini mestinya melahirkan pandangan dan tindakan, jika Indonesia adalah sebuah pemerintahan, maka pemerintahan itu haruslah menyusun kebijakan yang menghargai keberagaman dalam seluruh tata kelola pemerintahannya *(inclusive governance).* Jika Indonesia adalah kumpulan masyarakat warga, maka sebagai masyarakat warga, haruslah menjadi warga masyarakat yang menghormati keberagaman, perbedaan atau menjadikan sikap toleran sebagai bagian dari laku lampah, cara memandang semua entitas kewargaan dan kebangsaannya (*inclusive people)*. Jika Indonesia adalah sebuah bangsa yang besar, maka keberagamanlah pondasinya. Jauh sebelum NKRI dilahirkan dengan perjuangan yang heroik, di wilayah Nusantara (cikal bakal teritorial NKRI) telah ada sekitar 17.000 pulau dengan 1.128 suku bangsa. Mereka mendiami wilayah-wilayah di Nusantara. Keberadaan mereka sebagai komunitas/kelompok inheren di dalamnya. Eksistensi atas identitas tradisi, tanah

tempat tinggal, kepercayaan bahkan tata kelola sistem yang disepakati di wilayah komunitas. Hampir semua wilayah di Indonesia selalu terdapat masyarakat asli (adat). Data Aliansi Masyarakat Adat menunjukan bahwa ada sekitar 20% masyarakat adat dari total penduduk Indonesia. Itu berarti sekitar 50-70 juta orang.

Jika NKRI adalah Negara bangsa *(nation state)* dan merupakan wadah besar bagi suku-suku yang mendiami wilayahnya maka sejatinya NKRI harus melindungi keberadaan masyarakat warga yang mendiaminya karena mereka adalah indentitas Negara itu sendiri. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan atas keberadaan (hak hidup, hak atas nilai yang dianut termasuk didalamnya perecayaan dan budaya bahkan tata sosial kemasyarakatan). Hak itu bisa disebut hak dasar asal usul. Disamping itu terdapat hak yang melekat sebagai warna Negara Indonesia sebagai perwujudan dari dibentuknya NKRI yaitu hak-hak dasar warga Negara termasuk di dalamnya hak atas layanan publik.

Namun bangsa yang besar, mengalami tantangan yang besar. Keberagaman sebagai nilai utama, fakta, tidak sepenuhnya dipahami atau inheren pada sistem tata kelola pemerintahan maupun pada masyarakat warga. Setidaknya dalam 15 tahun terakhir tantangan terus bermunculan. Kebijakan yang tidak cukup peduli terhadap nilai-nilai, cara pandang yang beragam atau sikap yang tidak mencerminkan kewargaan yang lahir dari perbedaan. Faktanya, masih terdapat kelompok orang yang tidak diterima, didiskriminasi bahkan dieksklusi. Pelakunya dalam berbagai temuan justru memperlihatkan bahwa Negara kerap berada dalam pusaran

pelaku. Potretnya adalah; *Pertama,* terdapat kebijakan yang mendiskreditkan kelompok warga. *Kedua,* aparatus Negara melakukan pengabaian atas hak-hak layanan kewargaan. Atau bahkan di beberapa wilayah nampak ada upaya pengeksklusian dan penyerangan. Aparatus juga kerap menjadi pihak yang terlibat dalam tindak kekerasan terhadap masyarakat adat, misalnya dalam konflik SDA. Dimana apratus Negara bekerjasama dengan pihak swasta yang menganeksasi wilayah masyarakat. *Ketiga,* masyarakat yang menstigma bahkan melakukan penyerangan.

Selain masyarakat adat, ada kelompok-kelompok lain yang juga mengalami pengeksklusian. Mereka adalah kelompok minoritas agama. Problem utama kelompok minoritas agama memiliki ciri pengeksklusian yang sama dengan masyarakat adat yakni tidak adanya perlindungan atas kebebasaan menganut dan mengekspresikan kepercayaan. Eksklusi yang dialami seperti stigma dan diskriminasi. Dengan kata lain, tidak mendapatkan hak-hak kewargaan seperti layanan publik, bahkan mengalami kekerasaan fisik. Dalam relasi antar warga, tantangan di depan mata adalah situasi kewargaan yang retak. Faktanya, masih ada sejumlah warga yang belum menerima fakta pluralitas NKRI dan memaksakan kehendaknya.

Tujuan program dan tujuan training pengabdian

Tujuan besar program pengabdian adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan rekognisi sosial; melalui penguatan nilai-nilai kebudayaan yang inklusif dan atau penciptaan ruang-ruang penerimaan masyarakat seperti berbagai forum kewargaan.
2. Melakukan advokasi; melalui upaya mempengaruhi kebijakan. Dalam konteks ini lembaga menempuh

cara memperkuat advokasi pada layanan hak-hak dasar khususnya layanan kependudukan (KTP, Akta Lahir dan Layanan Menikah), Pendidikan dan Kesehatan. Advokasi dilakukan wilayah kerja program/ berbasis teritorial.

3. Menciptakan kader lokal yang mampu mengembangkan upaya/kerja-kerja mendorong inklusifitas di wilayah masing-masing. Termasuk di dalamnya memahami arah advokasi untuk masyarakat adat dan minoritas agama.
4. Menciptakan kader yang mampu menjadi fasilitator perdamaian untuk training perdamaian di wilayah masing-masing.

MODUL 1

ORIENTASI PELATIHAN

Pengantar

Oritentasi pelatihan merupakan sesi pembuka yang dijadikan pintu masuk dalam membangun suasana belajar antara pihak-pihak yang terkait selama proses pelatihan berlangsung. Meski ini bukan materi utama, tapi ini menempati posisi yang cukup penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu pelatihan. Jika suasana belajar tidak terbangun dengan baik sejak awal, maka kemungkinan proses pelatihan akan terganggu dan berjalan tidak efektif.

Agar proses pelatihan dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama, maka sesi ini dipergunakan untuk melakukan dan menyepakati beberapa hal. *Pertama,* perkenalan semua orang yang terlibat dalam forum pelatihan, baik peserta, fasilitator, maupun panitia. Kedua, penjelasan alur proses pelatihan dan kesepakatan jadwal pelatihan. *Ketiga,* kesepatakan tentang

tata tertib aturan yang harus ditaati oleh semua pihak selama proses pelatihan berlangsung. *Keempat,* penjelasan dan diskusi tentang posisi dan peran ranting sebagai ujung tombak organisasi.

Tujuan

1. Memperkenalkan semua orang yang terlibat dalam pelatihan yaitu peserta, fasilitator, dan juga panitia.
2. Membangun suasana komunikasi yang cair dan tanpa canggung antar peserta dan juga fasilitator.
3. Membuat kesepakatan bersama tentang alur pelatihan dan aturan selama pelatihan berlangsung.
4. Memberikan penjelasan kepada peserta tentang peran penting Cabang sebagai ujung tombak organisasi.

Pokok Bahasan

1. Pembukaan Acara Pelatihan
2. Perkenalan dan Kontrak Belajar
3. Penjelasan Alur Pelatihan

Durasi

Waktu yang dibutuhkan: 2 Jam

1. Pembukaan Acara Pelatihan (40 menit)
2. Perkenalan dan Kontrak Belajar (40 menit)
3. Penjelasan Alur Pelatihan (40 menit)

Metode

1. Diskusi kelompok
2. Presentasi
3. Tanya Jawab

Peralatan

1. Kertas Plano;
2. Spidol besar;
3. Lakban kertas;
4. *Infocus* (LCD);
5. Laptop/computer;
6. Kertas metaplan.

LANGKAH-LANGKAH

Materi I: Pembukaan Acara Pelatihan

1. Fasilitator berkoordinasi dengan panitia.
2. Panitia menyiapkan petugas untuk prosesi pembukaan. Petugas yang diperlukan adalah:
   a. Pembawa acara
   b. Pembaca ayat suci al-Quran
   c. Dirigen untuk memimpin lagu Indonesia Raya
   d. Sambutan ketua tim sekaligus membuka acara.
   e. Pembaca doa
3. Acara pembukaan dimulai. Adapun susunan acara pembukaan adalah sebagai berikut:
   a. Pembukaan oleh MC, dengan membaca surat al-Fatihah
   b. Pembacaan ayat suci al-Quran
   c. Pembacaan Sholawat Badar diikuti oleh *audiens*
   d. Menyanyikan lagu "Indonesia Raya", *audiens* dipersilahkan berdiri
   e. Sambutan Ketua tim sekaligus membuka acara.
   f. Pembacaan doa
4. Prosesi acara pembukaan selesai.

Materi II: Perkenalan dan Kontrak Belajar

1. Fasilitator menjelaskan kepada peserta tentang sesi ini dan hasil yang akan diperoleh, serta proses yang akan ditempuh.
2. Untuk memudahkan perkenalan dan juga *profiling* peserta, fasilitator membagi peserta dalam kelompok atau langsung perkenalan sendiri.
3. Dalam kelompok, fasilitator menjelaskan kepada masing-masing kelompok agar berkenalan dengan sesama peserta di satu kelompok. Lalu, menuliskan semua data peserta dalam bentuk table yang ditulis di kertas plano. Data perserta yang harus ditulis adalah sebagai berikut:
   a. Nama lengkap
   b. Tempat dan tanggal lahir
   c. Pendidikan terakhir
   d. Utusan dari
4. Setiap kelompok harus memilih ketua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
5. Usai perentasi kelompok, fasilitator menanggapi dan mengklasifikasi profil peserta (rata-rata usia, latar belakang, profesi, apakah ada yang tidak sesuai dengan kategori peserta, dll).
6. Bila semua kelompok sudah presentasi, selanjutnya fasilitator berdiskusi dengan peserta tentang: tata tertib selama pelatihan, meliputi: apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan sangsi.
7. Fasilitator mencatat hasil kesepakatan tata tertib itu di plano, lalu menempelkannya di dinding.

Materi III: Penjelasan Alur Pelatihan

1. Fasilitator menjelaskan alur pelatihan, dengan bahan Kerangka Pikir Pelatihan.
2. Beri kesempatan peserta untuk tanya jawab.
3. Setelah peserta memahami alur pelatihan, fasilitator menjelaskan jadwal pelatihan dan menawarkannya kepada peserta.
4. Fasilitator menjelaskan kesepakatan alur pelatihan dan jadwal pelatihan.
5. Hasil kesepakatan alur dan jadwal pelatihan ditempel didinding dalam kelas.

MODUL 2

Konflik

Pengantar

Konflik muncul akibat perbedaan antara kondisi aktual dan persepsi antara person atau kelompok yang bisa berujung pada tindak kekerasan, baik verbal maupun fisik.

Pada prinsipnya, konflik adalah sesuatu yang natural (alami) dan dibutuhkan sebagai bagian dari hidup ini. Misal danyalam rumah tangga, tempat kerja antar kolega, atau bernegosiasi dengan pemerintah. Kalau itu bisa diatur dan dikelola dengan baik, akan menjadi positif dan memotivasi untuk evaluasi dan berbuat lebih baik. Tetapi bisa negatif dan menjadi hal paradoks yang sulit dipahami, karena konflik sering berujung pada rusaknya hubungan, bahkan melahirkan tindak kekerasan yang sulit terlupakan.

Di sesi inilah kita akan banyak membincang konflik, terlebih soal konflik sosial yang berimplikasi luas, termasuk melihat beragam framing konflik yang sering muncul

dengan beragam latar belakang, akar masalah, aktor dan analisis konflik yang penting menjadi bekal peserta untuk implementasi program di masing-masing cabang.

Tujuan

Materi ini dipelajari dengan tujuan untuk memahami konflik, framing konflik dan berbagai akar, latar belakang dan masalah yang muncul terkait konflik dan bagaimana bekerja di daerah yang berkonflik, baik yang masih bersifat laten maupun sudah nyata atau *manifest*, bahkan proses rehabilitasi konflik.

Hasil yang Diharapkan

Setelah materi ini dipelajari, peserta diharapkan mampu:

1. Memiliki pemahaman terkait konflik, yakni: framing dan analisis terkait konflik, latarbelakang, akar, aktor dan hal lain terkait konflik dan penyelesaiannya.
2. Selain piawai dalam ranah teori dan analisis, pun di saat yang sama memiliki kecakapan untuk melakukan resolusi konflik.

Pokok Bahasan

1. Konflik dan Framing Konflik, dengan kisi-kisi:
   a. Bagaimana konflik terjadi dengan beragam contoh kasus
   b. Bagaimana framing konflik, *understanding* (pemahaman) dan analisis konflik
   c. Beragam *tools* atau perangkat untuk memahami konfli, baik masih *laten* (potensi) maupun *manifest* (sudah terjadi).

Durasi Waktu

Waktu yang dibutuhkan 2 jam (120 menit):

1. Garis Besar Konflik (60 menit)
2. Framing dan Analisis Konflik (60 menit)

Metode

1. Ceramah dan dialog
2. Tanya Jawab

Peralatan

1. Kertas Plano
2. Spidol besar
3. Lakban kertas
4. *Infocus* (LCD)
5. Laptop/computer
6. Kertas metaplan.

Langkah-langkah

Materi: Konflik dan *Framing* Konflik (120 menit)

15 menit: pembuka wacana

1. Fasilitator membuka sesi ini dengan ceria dan menjelaskan maksud dan tujuan sesi ini secara singkat dan gamblang.
2. Fasilitator mengawali sesi ini dengan yel semangat.

60 menit presentasi narasumber

1. Fasilitator mengundang narasumber untuk memberikan pengantar diskusi tentang konflik dan framing konflik
2. Fasilitator mempersilahkan narasumber untuk memberikan pengantar diskusi selama 60 menit.

45 menit dialog (tanya jawab) dengan narasumber

1. Setelah narasumber mengakhiri asupan pengantar diskusi, fasilitator membuka sesi dialog atau tanya jawab selama 45 menit. Fasilitator mengajak peserta untuk bertanya,

berpendapat, dan mengemukakan pendapatnya tentang wacana yang telah disampaikan narasumber.

Setelah diskusi (tanya jawab) dengan narasumber selesai, dan peserta telah istirahat atau *break* sejenak.

MODUL 3

Analisa Peta Konflik Di Tingkat Lokal

Pengantar

Setelah belajar konflik dan framing konflik, berikutnya peserta diajak untuk melihat konflik baik laten maupun manifest yang terjadi di masing-masing daerah dampingan cabang. Dengan melihat contoh konflik di masing-masing cabang ini diharapkan pemahaman konflik, framing konflik termasuk pemahaman inklusi sosial di cabang semakin lengkap. Dari sini diharapkan akan muncul beragam kiat dan langkah-langkah yang harus dilakukan masing-masing cabang bagi upaya jalan keluar bagi konflik dan upaya mebangun inklusi sosial yang terkait implementasi program.

Tujuan

Materi ini dipelajari dengan tujuan agar peserta mampu memahami kondisi riil peta konflik cabang dan indikator-indikator konflik baik laten maupun manifest termasuk soal proses eksklusi yang terjadi hingga upaya mebangun inklusi soosial di masing-masing cabang.

Hasil yang Diharapkan

Setelah materi ini dipelajari, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami kondisi konflik cabang, meliputi: kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

2. Memahami indikator munculnya konflik atau potensi konflik yang ada.
3. Memahami langkah-langkah yang harus ditempuh dalam implementasi program dengan melihat konflik dan potensinya, hingga soal eksklusi dan langkah-langkah membangun inklusi sosial di level cabang.

Pokok Bahasan

1. Presentasi kondisi konflik dan eksklusi di cabang
2. Analisa Konflik Cabang
3. Indikator
4. Langkah-langkah membangun inklusi sosial di wilayah konflik baik laten maupun manifest

Durasi Waktu

Waktu yang dibutuhkan: 2 jam.

1. Peta konflik Cabang (60 menit)
2. Analisa dan Indikator konflik dan eksklusi (30 menit)
3. Langkah-langkah inklusi sosial di wilayah konflik (30 menit)

Metode

1. Ceramah dan dialog;
2. Diksusi Kelompok dan Presentasi
3. Brainstorming
4. Simulasi

Peralatan

1. Kertas Plano;
2. Spidol besar;
3. Lakban kertas;

4. Infocus (LCD);

5. Laptop/computer;

6. Kertas metaplan.

LANGKAH-LANGKAH

Materi: Analisa Peta Konflik di Tingkat Lokal

Waktu: 120 Menit

1. Fasilitator membuka sesi ini dengan ceria dan menjelaskan maksud dan tujuan sesi ini secara singkat dan gamblang.
2. Fasilitator mengawali sesi ini dengan menanyakan kepada peserta tentang bagaimana konflik di masing-masing cabang. Termasuk laten atau manifest kah?
3. Masing-masing peserta cabang secara bergantian diberi kesempatan untuk presentasi peta konflik cabang, eksklusi yang terjadi dan upaya inklusi yang sudah dilakukan.
4. Fasilitator lalu menggarisbawahi dan menyimpulkan poin-poin penting hasil brainstorming dengan peserta.
5. Untuk memahami bersama-sama tentang peta konflik, eksklusi dan inklusi yang terjadi di cabang, fasilitator melakukan analisis berdasarkan pendekatan yang disepakati bersama peserta.
6. Analisis di atas dilakukan dengan cara tukar pendapat dengan peserta. Peserta memberikan pendapat, lalu fasilitator menulisnya dalam kertas plano di depan kelas.

MODUL 4

Sistem Peringatan dan Tanggap Dini Konflik

(*Early Warning and Early Respon System/EWRS*)

Pengantar

Ketika terjadi konflik, apa yang harus dilakukan? Atau adakah tanda-tanda awal yang bisa dikenali sebelum pecah konflik? Nah, dua pertanyaan ini sudah menunjukkan pentingnya peserta mengenal istilah konflik *laten* dan *manifest*. Ada situasi pra konflik yang harus dikenali dan bagaimana melakukan tindakan pencegahan, dan bagaimana bertindak ketika terjadi konflik hingga apa upaya yang bisa dilakukan untuk merehabilitasi pasca konflik.

Di sesi inilah segala hal terkait alur konflik, tindakan preventif, proses dan dinamika konflik, eskalasi dan beragam istilah lain akan dibahas. Bagaimana membangun sistem peringatan dini dan tanggap dini konflik, dengan segala persoalan dan aspek yang melingkupi. Banyak persoalan yang harus diperbincangkan di sesi ini terkait langkah-langkah yang harus dilakukan, baik pra konflik, saat konflik, dan pasca konflik, terlebih masing-masing cabang bisa menyampaikan contoh kasus yang sudah dihadapi yang juga beragam.

Tujuan

Materi ini dipelajari dengan tujuan agar peserta mampu memahami Sistem Peringatan Dini dan Tanggap Dini Konflik dengan beragam alur, pendekatan dan langkah-langkah penyelesaiannya.

Hasil yang Diharapkan

Setelah materi ini dipelajari, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami kondisi konflik cabang, dan sistem peringatan dan tanggap dini konflik yang sesuai dengan permaslahan yang dihadapi.

2. Memahami langkah-langkah yang harus ditempuh dalam implementasi program dengan melihat konflik dan potensinya, hingga soal eksklusi dan langkah-langkah membangun inklusi sosial di level cabang.

Pokok Bahasan

1. Sistem peringatan dini dan tanggap dini konflik
2. Analisa Konflik Cabang dan Alur Konflik yang terjadi
3. Langkah-langkah membangun inklusi sosial di wilayah konflik baik *laten* maupun *manifest*

Durasi Waktu

Waktu yang dibutuhkan: 4 jam.

1. Paparan Sistem Peringatan dan Tanggap Dini Konflik (60 menit)
2. Analisa dan alur konflik cabang terkait SPTDK (40 menit)
3. Langkah-langkah inklusi sosial di wilayah konflik (40 menit)
4. Praktek dan Kerja Kelompok Cabang (100 menit)

Metode

1. Ceramah dan dialog
2. Diksusi Kelompok dan Presentasi
3. Brainstorming
4. Simulasi

Peralatan

1. Kertas Plano
2. Spidol besar
3. Lakban kertas
4. *Infocus* (LCD)

5. Laptop/computer
6. Kertas metaplan

LANGKAH-LANGKAH

Materi: Sistem Peringatan dan Tanggap Dini Konflik

Waktu: 240 Menit

1. Fasilitator membuka sesi ini dengan ceria dan menjelaskan maksud dan tujuan sesi ini secara singkat dan gamblang.
2. Fasilitator mengawali sesi ini dengan memberikan gambaran dan paparan terkait materi Sistem Peringatan Dini dan Tanggap Dini Konflik
3. Fasilitator menanyakan kepada peserta tentang bagaimana konflik di masing-masing cabang. Termasuk laten atau manifest kah? Dan apa yang sudah dilakukan terkait Sistem Peringatan dan Tanggap Dini Konflik yang sudah dilakukan.
4. Fasilitator lalu menggarisbawahi dan menyimpulkan poin-poin penting hasil brainstorming dengan peserta.
5. Fasilitator meminta peserta membagi dalam kelompok cabang masing-masing untuk melakukan kerja kelompok dengan tema yang disepakati bersama peserta.
6. Fasilitator meminta masing-masing kelompok peserta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok.
7. Fasilitator memberikan komentar, analisis dan tanggapan terkait presentasi hasil kerja kelompok.
8. Fasilitator bersama peserta memberikan catatan-catatan dan bersama melakukan kongklusi terkait tema bahasan Sistem Peringatan dan Tanggap Dini Konflik.

MODUL 5

Mediasi Konflik

Pengantar

Bekerja di wilayah konflik tentu berbeda dengan bekerja dalam kondisi damai. Dibutuhkan beragam cara dan langkah serta pemahaman yang memadai terkait konflik yang terjadi. Di sinilah pentingnya belajar bagaimana memediasi konflik. Bagaimana berperan menjadi mediator yang baik dan tepat. Perlu juga mengenal etika dan hal-hal yang harus dipahami terkait menjadi mediator dan bekerja di wilayah konflik. Langkah dan strategi apa yang harusnya diterapkan dalam kerja-kerja pendampingan di wilayah konflik. Berjejaring dengan lembaga apa saja dalam mengupayakan mediasi, hingga media dan sarana media apa saja yang digunakan untuk menguatkan dan mendukung kerja menjadi mediator yang sukses.

Sesi ini akan banyak mengeksplorasi kerja-kerja di wilayah konflik dan bagaimana menjadi mediator konflik yang tepat, jangan sampai justru menjadi pemicu konflik lanjutan yang semakin merumitkan konflik yang terjadi.

Tujuan

Materi ini dipelajari dengan tujuan agar peserta mampu memahami apa itu mediasi konflik dan bagaimana melakukan kerja mediator yang sesuai, tentu dengan memperhatikan etika dan nilai-nilai lokal yang tidak dilanggar.

Hasil yang Diharapkan

Setelah materi ini dipelajari, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami mediasi konflik dan beragam trik, tips dan pendekatan yang dapat diterima dengan baik.

2. Memahami bagaimana bekerja di wilayah konflik, menjadi mediator dan etika serta aturan yang harus dipatuhi.
3. Menemukan cara dan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam memediasi konflik yang sesuai dengan wilayah masing-masing, dalam upaya membangun inklusi sosial di level cabang.

Pokok Bahasan

1. Mediasi Konflik dengan beragam pengertian, cara dan pendekatan
2. Bagaimana menjadi mediator yang dapat diterima kelompok yang berkonflik
3. Langkah-langkah mediasi dalam upaya membangun inklusi sosial di wilayah konflik baik laten maupun manifest

Durasi Waktu

Waktu yang dibutuhkan: 2 jam.

1. Paparan Mediasi Konflik (40 menit)
2. Menjadi Mediator yang baik berdasar etika dan aturan serta nilai lokal yang tidak dilanggar (40 menit)
3. Langkah-langkah mediasi dalam membangun inklusi sosial di wilayah konflik (40 menit)

Metode

1. Ceramah dan dialog
2. Diksusi Kelompok dan Presentasi
3. *Brainstorming*
4. Simulasi

Peralatan

1. Kertas Plano

2. Spidol besar
3. Lakban kertas
4. *Infocus* (LCD)
5. Laptop/computer
6. Kertas metaplan

LANGKAH-LANGKAH

Materi: Mediasi Konflik

Waktu: 120 Menit

1. Fasilitator membuka sesi ini dengan ceria dan menjelaskan maksud dan tujuan sesi ini secara singkat dan gamblang
2. Fasilitator mengawali sesi ini dengan memberikan gambaran dan paparan terkait materi Mediasi Konflik
3. Fasilitator menanyakan kepada peserta tentang apa yang sudah dilakukan terkait mediasi konflik di masing-masing cabang.
4. Fasilitator lalu menggarisbawahi dan menyimpulkan poin-poin penting hasil brainstorming dengan peserta.
5. Fasilitator meminta peserta membagi dalam kelompok cabang masing-masing untuk melakukan kerja kelompok dengan tema yang disepakati bersama peserta.
6. Fasilitator meminta masing-masing kelompok peserta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok.
7. Fasilitator memberikan komentar, analisis dan tanggapan terkait presentasi hasil kerja kelompok.
8. Fasilitator bersama peserta memberikan catatan-catatan dan bersama melakukan kongklusi terkait tema bahasan Mediasi Konflik.

MODUL 6

Menyusun RTL (Rencana Tindak Lanjut)

Pengantar

Rencana tindak lanjut adalah cara untuk melanjutkan komunikasi antara tim panitia, fasilitator dengan peserta pelatihan. Ini bagian dari mengawal dan melihat perkembangan para peserta pelatihan setelah mendapat bekal selama pelatihan. Apakah para peserta melakukan berbagai rencana yang pernah dipresentasikan dan menularkan kemampuan yang diperoleh dari bekal selama pelatihan.

Tujuan

Materi ini dipelajari dengan tujuan agar peserta mampu menyusun rencana kongkrit dan tindak lanjut yang akan dilakukan setelah mengikuti pelatihan dari program pengabdian.

Hasil yang Diharapkan

Setelah materi ini dipelajari, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami apa tindak lanjut yang akan dilakukan pasca pelatitan
2. Menyusun tindak lanjut yang kongkrit dan time line usai pelatihan
3. Memberikan hasil RTL ke Tim Program pelaksana pengabdian

Pokok Bahasan

1. Pentingnya RTL dalam setiap pelatihan
2. Bagaimana membuat RTL yang terukur

Durasi Waktu

1. Waktu yang dibutuhkan: 2 jam.
2. Pentingnya RTL dalam setiap pelatihan (40 menit)
3. Membuat dan presentasi RTL yang terukur dan oke (80 menit)

Metode

1. Presentasi dan Kerja Kelompok
2. Brainstorming

Peralatan

1. Kertas Plano
2. Spidol besar
3. Lakban kertas
4. *Infocus* (LCD)
5. Laptop/computer
6. Kertas metaplan

LANGKAH-LANGKAH

Materi: Menyusun RTL

Waktu: 120 Menit

1. Fasilitator membuka sesi ini dengan ceria dan menjelaskan maksud dan tujuan sesi ini secara singkat dan gamblang.
2. Fasilitator mengawali sesi ini dengan memberikan gambaran dan paparan terkait materi bagaimana menyusun RTL yang terukur dan oke.
3. Fasilitator mengajak peserta untuk mengeksplorasi beragam startegi, cara dan langkah serta pendekatan yang harus dilakukan dalam menyusun RTL di masing-masing cabang.

4. Fasilitator lalu menggarisbawahi dan menyimpulkan poin-poin penting hasil brainstorming dengan peserta.
5. Fasilitator meminta peserta membagi dalam kelompok untuk menyusun RTL masing-masing.
6. Fasilitator meminta masing-masing kelompok peserta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok.
7. Fasilitator memberikan komentar, analisis dan tanggapan terkait presentasi hasil kerja kelompok.
8. Fasilitator bersama peserta memberikan catatan-catatan dan bersama melakukan kongklusi terkait tema bahasan menyusun RTL.

BAB V
KESIMPULAN

Konflik antar kelompok masyarakat di Puger yang bernuasa ajaran agama sebenarnya bukan hanya sunni-syiah saja dan bukan pula konflik baru. Bibit-bibit masalah semacam ini sebenarnya sudah ada sejak awal tahun 1980-an, bahkan jauh sebelum itu. Konflik antara kelompok pengikut Habib Ali Al Habsyi dan pendukung Ustadz Fauzi sebenarnya terkonsentrasi di Desa Puger Kulon saja. Ustadz Fauzi tinggal di Dusun Mandaran 2 dan Habib Ali di Dusun Mandaran 1.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kerusuhan di Puger yang saling berkaitan, dan tidak berdiri sendiri, *pertama* adalah perselisihan kedua kelompok Habib Ali dan Ustad Fauzi yang memiliki faham keagamaan berbeda, dan sudah terjadi sejak lama. *kedua*, penyelenggaraan karnaval yang tidak diizinkan aparat kepolisian, hingga menyebabkan tindak pidana perusakan dan penganiayaan. *ketiga*, adanya kemungkinan provokasi dari pihak luar, *keempat*, dikarenakan adanya faham dan ajaran syi'ah–karena memang ajaran tersebut sangat berpotensi menimbulkan gesekan dan keresahan masyarakat di Kecamatan Puger khususnya di desa Puger Kulon dan sekitarnya– sebagamana faham dan ajaran yang disebarkan oleh Habib Ali.

Beberapa upaya resolusi konflik Sunni-Syiah yang ditempuh oleh berbagai kalangan pasca konflik, antara lain: 1) rapat koordinasi di tingkat muspida dengan melibatkan berbagai elemen dalam rangka meredam konflik yang lebih luas; 2) meningkatkan intensitas komunikasi antar etnis dan golongan dalam upaya mengantisipasi isu-isu yang sifatnya provokatif; 3) menindak tegas para pelaku dan otak kerusuhan melalui upaya mencari, menahan/menangkap serta menghukum sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku; 4) menghimbau kepada masyarakat Puger khususnya desa Puger Kulon agar tetap tenang dan sabar dan untuk masa-masa yang akan datang 5) memberikan bantuan kepada korban atas kerugian harta benda maupun jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu Sutarto, *Menjadi NU Menjadi Indonesia*, Jember, Kopyawisda Jatim, 2005.

Abdul Munir Mulkan, dkk, *Membongkar Praktik Kekerasan: Menggagas Kultur Nir-Kekerasan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.

Afif Muhammad, *Agama & Konflik Sosial*, Bandung: MARJA, 2013.

Alpha Amirrachman. *Revitalisasi Kearifan Lokal*, Jakarta Selatan: ICIP, 2007.

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Hasrullah, *Dendam Konflik Poso*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Mulkan, Abdul Munir Mulkan, dkk, *Membongkar Praktik Kekerasan: Menggagas Kultur Nir-Kekerasan,* Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.

Robert Alexander, *Konflik Antar Entis dan Penanggulangannya*, Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.

Sandi Suwardi Hasan, *Konflik Sosial dan Urgensi Dialog Agama, al-'Adalah,* 2 Jember: STAIN Press, 2007.

Slamet Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila,* Yogyakarta: ANDI, 2006.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), "Keadilan Macet, Kekerasan Jalan Terus: Laporan Tahunan Kondisi HAM di Indonesia 2012.

Ihsan dkk, *Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)*, (hasil penelitian yang bekerjasama Yayasan Wakaf Paramadina (YWP) Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM), *The Asia Foundation* (TAF), Jakarta, 2009.

Imam B. Jauhari, *Teori Sosial: Proses Islamisasi dalam Sistem Ilmu Pengetahuan,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

http://alislamiyah.uii.ac.id/2013/08/22/menguak-akar-kekerasan-bernuansa-gama/#_ftn4 lihat juga The Wahid Institute, "Lampu Merah Kebebasan Beragama", Laporan Kebebasan Beragama dan Toleransi di Indonesia, (Jakarta: The Wahid Institute, 2011.

Ibnu Katsir, Kisah Habil dan Qabil (Dar Al-Manarah) dalam ebook www.Islambasics.com

Tim Balai Litbang, *Mencari Solusi Konflik dan Kekerasan Internal Umat Islam* dalam http://www.balitbangdiklat.kemenag.go.id/sinopsis-hasil-penelitian/kehidupan-beragama/283-mencari-solusi-konflik-dan-kekerasan-internal-umat-keragama.html

Rizqon Khamami, *Tashwirul Afkar* (Jakarta Selatan: LAKPESDAM dan TAF, 2004), 41 edisi nomor 17. Selain itu, Harun Nasution, dalam *Islam Ditinjau dari Berbagai Perspektif* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2002.

M. Atho Mudzhar, *"Lingkungan Dan Peran Strategis Fkub Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan*

Persatuan Nasional" dalam ,http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/indeks/artikel-ilmiah/593--lingkungan-dan-peran-strategis-fkub.html

Tim Balai Litbang, *Konflik-konflik Sosial Bernuansa SARA di Berbagai Komunitas.* Dalamhttp://www.balitbangdiklat.kemenag.go.id/sinopsis-hasil-penelitian/kehidupan-beragama/172-konflik-konflik-sosial-bernuansa-sara-di-berbagai-komunitas-studi-kasus-kerusuhan-mataram-januari-2000.html

Syafuan Rozi, *Kekerasan Komunal:Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Syafuan Rozi dkk, *Kekerasan Komunal,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Suharno makalah yang disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Resolusi Konflik pada *Civics Community, Konflik, Etnisitas dan Integrasi Sosial*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2006.

Robby I. Candra, *Konflik dalam hidup sehari-hari,* Kanisius, Yohyakarta, 1992.

Nurman Said, *Masyarakat Muslim Makasar*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.

Yusuf Qardhawi, *Islam Ekstrem,* Bandung: Mizan, 1993.

Lib-For All Foundation, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institute, 2009.

Zaiyardam Zubir. *Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan: Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Kearifan Lokal*. Yogyakarta: INSIST Press, 2010.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka, 1988.

Marshanda Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan Galtung*, Yogyakarta: Kanisius,1992.

Sumber Media

Data dioleh dari kantor desa Puger Kulon Jember

Sabrina Asril, Catatan Kekerasan Indonesia pasca Reformasi, dalam http://1ahmadiyah.blogspot.com/2013/01/catatan-kekerasan-indonesia-pasca.html

www.pemkabjember.go.id/v3/kecamatan/puger.php

Wawancara dengan Nur Hasan (kepala desa Puger Kulon) dan Aliyul Hadi (kepala Dusun Gedangan sekaligus suami dari kepala dusun Mandaran 2)

http://politik.kompasiana.com

Deskripsi diolah dari berbagai sumber, data dari Sekretaris *Lajnah Ta'lif wa Nasyr (*LTN) NU Jember, MUI Puger, MWC NU Puger dan media-media *online* seperti http://regional.kompasiana.com/2013/09/18/pernyataan-ketua-pmii-jatim-terkait-tragedi-puger-adalah-asbun-593695.html

http://nukencong.or.id

Deskripsi diolah dari berbagai sumber, data dari Sekretaris *Lajnah Ta'lif wa Nasyr (*LTN) NU Jember, MUI Puger, MWC NU Puger dan media-media *online* seperti http://regional.kompasiana.com/2013/09/18/

pernyataan-ketua-pmii-jatim-terkait-tragedi-puger-adalah-asbun-593695.html

Data diperoleh dari bapak Mudafir selaku ketua MWCNU Puger

www.beritajatim.com

Radar Jember, *Karnaval Rusuh, Satu Tewas,* tanggal 12 September 2013

Radar Jember, *Satu Menyerah di Lumajang*, tanggal 17 September 2013

http://www.suarasahabat.com/2013/09/18/alhamdulillah-two-camps-in-conflict-puger-agreed-peace/, data ini diunduh pada hari kamis 24 Pebruari 2020 jam 10.45 wib

BIODATA PENULIS

Dr. ASNAWAN, M.S.I, lahir di Pulau Sapudi Sumenep Madura, 25 Juni 1983. Sekolah Dasar Negeri Nyamplong Gayam Sapudi lulus 1994, MTs. Miftahul Ulum Banasem Gayam Sapudi Sumenep lulus 1999, Madrasah Aliyah (MA) Fathus Salaf Tj. Rejo Mangaran Situbondo lulus 2002, sejak tahun 1999 sampai 2002 mendalami ilmu agama di Pondok Pesantren Misykatul Ulum Sekar Putih Mangaran Situbondo yang diasuh K.H. Khofifi Mustaqim, selama satu tahun sempat menjadi student di *Basic English Course (BEC) and Rhima English Course.* Tahun 2003 melanjutkan kuliah (S-1) di Jurusan Tarbiyah Prodi PAI STAIN Jember selesai Program Sarjana Muda 2008, kemudian melanjutkan Program Pascasarjana (S-2) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010). Program Doktor S3 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Lulus tahun 2020. Sejak tahun 2010 aktivitasnya menjadi staf pengajar di IAI Al-Falah As-Sunniyyah (INAIFAS) Kencong Jember, IAIN Jember, Poltek Negeri Jember. Selama kuliah hingga sekarang sangat aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, antara lain: ia adalah salah satu delegasi dari STAIN Jember Kemah Karya International dan Seminar International: *Undertanding of Terorism* dan delegasi pertemuan pemuda Islam se-ASIA, pernah menjadi Ketua *Language Community (LC)* STAIN Jember, Perintis jurnal

transformatif BEM STAIN Jember 2007/2008, Menjabat Presiden Mahasiswa (Ketua BEM) STAIN Jember 2007-2008, sebagai Sekretaris Umum PMII Rayon Tarbiyah STAIN Jember 2007-2008, Wakil Sekretaris PC. GP. Ansor Kencong 2010-2015, Sekretaris Umum PC. Lakpesdam NU Kencong 2015-2019, Pengurus Cabang IKA-PMII Jember 2016-2021, Direktur PUSAKA Jember 2010-Sekarang, Pengurus LPTNU Cabang Kencong 2019-2023. Sekjend Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kencong 2020-2024.

Penelitian yang telah dilakukan, (1) Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Jember *(Riset Kolektif Mahasiswa Terbaik P3M STAIN Jember 2006),* **(2)** Modernisasi Pendidikan Madrasah dan Pesantren *(Diktis 2010*), (3) Integrasi Pendidikan Formal dan Pendidikan Diniyah Salafyah Terhadap Santri Assunniyyah Kencong Jember sebagai Antisipasi Output Pesantren di era Pendidikan Nasional *(Diktis 2014),* (4) Peace Building Berbasis Komunitas: Studi tentang Model Penyelesain Konflik Bernuansa Keagamaan di Puger Kulon dan Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. (5) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Nelayan dalam mengelola Potensi Lokal di Puger Jember Jawa Timur *(Diktis 2016). (6) Agensi Perempuan Lokal dalam peace building Studi Konflik Tambang Pasir Besi di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang (Diktis 2017). (7) Gender, Conflict and Peacebuilding in Indonesia oleh* UGM Yogyakarta, Program Riset *Gender Dimension of Social Conflict and Peacebuilding* Oleh. Genewa and Swiss National Science Foundation 2016-2020.

Menulis di *Jurnal Ilmiah:* Membongkar Dikotomi Pendidikan Islam yang Membatu *(Jurnal al-Fikrah Tarbiyah*

STAIN Jember, 2005), Ideologi Bukan Sekedar Gagasan Tapi Butuh Action *(Jurnal Movement PMII Rayon Tarbiyah STAIN Jember, 2007),* Qou Vadis Kerukunan Antar Umat Beragama *(Jurnal al-Hikmah Jurusan Dakwah STAIN Jember, 2008),* Persentuhan DIKNAS Dengan Kapitalisme Global *(Jurnal al-Fikrah Tarbiyah STAIN Jember, 2009).* Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam *(Jurnal Turats Jurusan Tarbiyah STAIN Jember ISSN 2085-5079, 2009),* Pendidikan Islam dan Tehnologi Informasi *(Jurnal Falasifa STAIFAS Kencong Jember ISSN 2085-3815, 2010), Jurnal:* Tauhid sebagai Paradigma Pemdidikan islam (Telaah pemikiran Ismail Al-Faruqi) *(Jurnal* AlFitrah *STAIN Jember ISSN. 1907-4336 Vol. 5. 2010),* Pendidikan Islam dalam Perspektif Hadratus Syeh KH. Hasyim Asy'ari *(Jurnal Rausyan Fikr STAIBU ISSN. 2085-8515, 2010),* Kontri-busi Pemikiran Mohammad Yunus Tentang Pembaharuan Pendidikan di Indonesia *(Jurnal* Falasifa *STAIFAS Kencong Jember. ISSN. 2085-3815 Vol. 1. No.3 Maret 2011),* Perkembangan Mdrasah pada Abad Pertengahan: Studi Pendekatan Sejarah Dalam Mengurai Kemajuan Madrasah *(Jurnal Istitute Pusaka Jember, ISSN: 2442-3807 2015),* Konflik Sosial Bernuansa Agama: Kajian Rumpun Kekerasan antara Kelompok Islam di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember *(Jurnal SALAM PPS Universitas Muhammadiyah Malang ISSN 1410-4512, 2015),* Pengembangan Sistem Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Diniyah: Suatu Kajian Interdisipliner *(Jurnal PAI FTIK-IAIN Jember Jurnal Al Fitrah: ISSN; 1907-4336, 2016),* Kontribusi Kajian Keagamaan dalam Sosiologi Islam *(Jurnal NUANSA STAIN Pamekasan, ISSN: 1907-7211, 2016). Integrasi Pendidikan Formal dan Pendidikan Diniyah Salafiyah Terhadap Santri Assunniyyah Kencong Jember Sebagai Antisipasi Output Pesantren di era Globalisasi Pendidikan*

Nasional (Jurnal Falasifa, ISSN.2085-3815, Vol.7 No.1, 2016), *Pendidikan Islam dan liberalisasi Pendidikan (kajian Terhadap Regulasi pendidikan Islam* (Jurnal Edumika: Jurnal pendidikan dan social. ISSN: 2442-3785, Vol.3 No.3, 2017). *Komparatif Teori Perkembangan Peserta Didik Menurut Barat Dengan Islam dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam* (Jurnal Falasifa, ISSN. p-2085-3815 e-ISSN: 2527-8711. Vol.07 No.01, 2017). *Urgensi Pengembangan Kurikulum Pesantren Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, (Jurnal Falasifa, p-ISSN.2085-3815 e-ISSN: 2527-8711. Vol.8 No.2, 2018), *Local Women's Agency in Peace Building: A Study on the Conflict of Iron Sand Mining in East Java, (*Jurnal Ulumuna (Terakreditasi Sinta-2): Journal of Islamic Studies UIN Mataram p. ISSN: 1411-3457, e-ISSN: 2355-7648, Vol.22 No.1, 2018), *Reformasi Pendidikan Pesantren Perspektif KH Abdul Wahid Hasyim: Konstruksi Pendidikan Islam Progresif Era Melinial*. (Terakreditasi Sinta-2) (Jurnal Edukasia P. ISSN: 1907-7254, e-ISSN: 2502-3039, Vol.13. No. 2, 2018). *Aplication Of Learning Inquiry The Kooperatif Tipe Talking Stick Dalam Belajar Al Quran Siswa Madrasah Ibtidaiyah* (Jurnal Auladuna INAIFAS Jember p-ISSN: 2657-1269 e-ISSN: 2656-9523, Vol.01. No.1 April 2019). Peran Kepemimpinan Kiai Di Pendidikan Pesantren Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Jurnal (Jurnal Falasifa, ISSN. 2085-3815, Vol. 11, Nomor 1 Maret, 2020). *Exploring Education Character Thought of Ki Hajar Dewantara and Thomas Lickona*, IJoASER (International Journal on Advanced Science, Education, and Religion) E-ISSN: 2614-8862 & P-ISSN: 2565-0836 Volume 3, Number 3, November 2020), *Relevansi Kebijakan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam* (Jurnal Tafhim Al Ilmi, Vol. 11 No. 2 (2020): 10 Februari 2020). *Enhancement Integrated Quality Management*

in Islamic Education Institutions, Vol. 1, No. 1, January 2021, *The Role of Supervisors and Principal in Increasing Teacher's Competencies at Madrasah Aliyah Ma'arif NU Kencong Jember*, Jurnal International Journal of Educational Research & Social Sciences ISSN: 2774-5406, 2021.

Buku yang telah ditulis*: (1)* Horizon Pendidikan Islam: Dari Dialektika ke Perilaku *(Absolute Media Yogyakarta, 2012); (2)* Cakrawala Pendidikan Islam: Suatu Pendekatan Emansipatoris Modern *(*ISBN: 978-602-7709-25-6, Absolute Media Yogyakarta *2012); (3)* Paradigma Pendidikan Islam: Sebuah Pendekatan Humanis Transendensi *(Absolute Media Yogyakarta, 2013). (4)* Manajemen Mutu Terpadu: Sebuah Upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) (ISBN978-602-1640-41-8, STAIN Jember Press *2013), (5)* Nalar Tauhid Pendidikan: Iktiyar Pendekatan Integrasi Keilmuan *(*ISBN: 978-602-98052-4-6 Tangga Ilmu Yogyakarta*, 2016).* (6) *Kapita selekta pendidikan Islam: Isu-Isu Kontemporer Pendidikan Islam dalam Bingkai Ke Indonesian* (Kencana Prenada Media Group ISBN; 978-602-422-206-2 Jakarta. **(7)** *Gender and Peace Building*: *Studi Agensi Perempuan dalam membangun perdamaian* (ISBN: 978-602-56475-8-7, Bildung Pustaka Utama, Bantul Yogyakarta, 2018), (8) *Gender and Peacebuilding A Study Of The Iron Sand Conflict In Wotgalih Village Yosowilangon Lumajang East Java* (Faculty of Cultural Science Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ISBN.978-602-96127-2-1, 2019). (9). *Tuhan Maaf Kami Lupa: Sehimpun Kisah Pengingat hati yang lalai.* (Laksana Yogyakarta ISBN.978-602-407-559-0, 2019). (10) *Kaki Langit Pendidikan Islam.* (Email. asnawanwan@gmail.com atau asnawan@inaifas.ac.id, Hp. 085236872766)

UNIVERSITAS

AL-FALAH AS-SUNNIYAH

جامعة الفلاح السنية

KENCONG – JEMBER – INDONESIA

https://uas.ac.id/

PERDAMAIAN BERBASIS KOMUNITAS

Konflik yang berujung pada kekerasan sudah mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana permukiman, peribadatan, lembaga pendidikan, perahu nelayan, korban luka, bahkan hingga hilangnya nyawa manusia, kejadian tersebut merupakan musibah sosial yang meskipun tidak pernah dikehendaki, disadari atau tidak hal tersebut tidak terhindari. Untuk itu upaya membukukan catatan sederhana ini semata-mata tidak dimaksudkan untuk membangkitkan kembali konflik yang telah "redam". Sama sekali tidak. Akan tetapi dengan dibukukannya hasil diskusi dan kajian mendalam ini, diharapkan menjadi tanda larang agar kita tidak lagi terjebak dalam konflik yang sangat melelahkan bahkan menimbulkan banyak kerugian dan hanya menjadi ancaman disintegrasi bangsa sebagai rasa persatuan Indonesia bahkan merugikan khususnya untuk kemajuan Islam, bangsa dan negara.

Bildung
+6281227475754
Bildung
@sahabatbildung
bildungpustakautama@gmail.com
www.penerbitbildung.com

ISBN 978-623-6379-36-3